



**RENCANA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL KSDAE
TAHUN 2016**

**RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2016**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

JAKARTA
2015



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Nomor: P.9/IV-SET/2015

TENTANG

RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2016

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun Rencana Kerja;
- b. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*;
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973*;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat*;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

24. Peraturan...

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
25. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025;
27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
28. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
30. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
31. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.7/KSDAE-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2016.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- (2) Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
- (3) Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2016 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2016 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2016 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 September 2015

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,



Tachrir Fathoni
Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001

**LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

Nomor: P.7/IV-SET/2015

TENTANG

**RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2016**



Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*)
Foto: Iskandar

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Tahun 2016 disusun sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016 disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE tahun 2016 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Dengan demikian, penyusunan Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib pelaporan.

Besar harapan kami bahwa Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016 ini dapat benar-benar dipedomani dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran kita bersama dapat tercapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian untuk dapat berpartisipasi di bidang tugas kita masing-masing dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Jakarta, 17 September 2015

Direktur Jenderal Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem,



(Handwritten signature)
Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel..... | iii |
| Daftar Lampiran | iv |
| Ringkasan Eksekutif | v |
| | |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas dan Fungsi | 2 |
| C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis..... | 5 |
| D. Program dan Kegiatan..... | 9 |
| | |
| II. CAPAIAN KINERJA..... | 11 |
| A. Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun 2014 | 11 |
| B. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2015 | 21 |
| | |
| III. RENCANA KERJA TAHUN 2016 | 29 |
| A. Rencana Kerja | 29 |
| B. Pengukuran Kinerja..... | 45 |
| C. Pembiayaan | 46 |
| | |
| IV. PENUTUP | 47 |
| | |
| Lampiran | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1. | Perkembangan Penyelesaian Konflik Kawasan Konservasi..... | 13 |
| Tabel 2. | Prognosis Capaian Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015... | 21 |
| Tabel 3. | Indikator Kinerja Program dan Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2016 | 29 |
| Tabel 4. | IKK, Target Kinerja Kegiatan, serta Standar Komponen Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2016..... | 30 |
| Tabel 5. | IKK, Target Kinerja Kegiatan, serta Standar Komponen Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2016 | 31 |
| Tabel 6. | IKK, Target Kinerja Kegiatan, serta Standar Komponen Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2016 | 32 |
| Tabel 7. | IKK, Target Kinerja Kegiatan, serta Standar Komponen Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2016 | 34 |
| Tabel 8. | IKK, Target Kinerja Kegiatan, serta Standar Komponen Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial Tahun 2016 | 35 |
| Tabel 9. | IKK, Target Kinerja Kegiatan, serta Standar Komponen Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Tahun 2016 | 36 |
| Tabel 10. | IKK, Target Kinerja Kegiatan, serta Standar Komponen Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional Tahun 2016 | 41 |
| Tabel 11. | IKK, Target Kinerja Kegiatan, serta Standar Komponen Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016 | 45 |
| Tabel 12. | Sumber Pembiayaan dan Jenis Belanja Pagu Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016..... | 46 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1. Penjelasan Umum Renja K/L TA. 2016 (Formulir 1) | 51 |
| Lampiran 2. Renja K/L TA. 2016 (Formulir 2) | 53 |
| Lampiran 3. Renja K/L TA. 2016 (Formulir 3) | 55 |
| Lampiran 4. Daftar Pagu Anggaran Per Satuan Kerja TA. 2016 | 125 |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat terus mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam pelaksanaan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, tanggung jawab pemerintah selaku pemegang mandat pengelolaan negara diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengamanatkan bahwa Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal KSDAE didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE; (2) Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (3) Direktorat Kawasan Konservasi; (4) Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati; (5) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi; (6) Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial; (7) Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam; serta (8) Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai Taman Nasional.

Agar upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumberdaya alam hayati, maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE tahun 2016 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Pedoman dan acuan dimaksud berupa Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016. Renja Direktorat Jenderal KSDAE disusun sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Embanan Direktorat Jenderal KSDAE berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan sumber-sumber plasma nutfah; serta (3) pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Dari embanan tersebut, obyek yang dikelola oleh Direktorat Jenderal KSDAE antara lain terdiri dari kawasan konservasi, keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan konservasi, serta kawasan atau ekosistem yang bernilai esensial dan *High Conservation Value of Forest*. Pengelolaan keanekaragaman hayati dilaksanakan pada tiga tingkatan, yaitu pada level ekosistem, spesies, dan pada level sumberdaya genetik. Pengelolaan keanekaragaman hayati ini bertujuan untuk mencapai multi manfaat, yaitu manfaat ekonomi, sosial, serta manfaat ekologi. Dari uraian tersebut, maka rumusan program yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal KSDAE adalah Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem adalah: (1) Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; serta (2) peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati. Sasaran program tersebut diindikasikan pencapaiannya dengan sembilan indikator kinerja program. Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan. Setiap kegiatan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja mandiri (pusat dan UPT di daerah) di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; (6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; (7) Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional; serta (8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2016, sebagaimana pagu indikatif tahun 2016, direncanakan sebesar Rp. 1.841.300.000.000,- (satu trilyun delapan ratus empat puluh satu milyar tiga ratus juta rupiah). Namun demikian, berdasarkan surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.312/Menlhk-Setjen/2015 sebagai tindaklanjut surat Menteri Keuangan nomor S-505/MK.02/2015 tentang Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2016, pagu anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016 berkurang menjadi Rp. 1.521.710.000.000,- (satu trilyun lima ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah). Alokasi pagu anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai gaji dan tunjangan, operasional perkantoran serta belanja non operasional perkantoran.



Orang Utan (*Pongo abelii*)
Foto: Iskandar

Orang Utan (*Pongo abelii*)
Foto: Iskandar



Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, atau lebih dikenal dengan sebutan keanekaragaman hayati, merupakan bagian terpenting dari sumberdaya alam, yang terdiri atas keanekaragaman tipe ekosistem, keanekaragaman jenis flora dan fauna, serta keanekaragaman sumberdaya genetik. Keanekaragaman hayati mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak tergantikan, dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka keanekaragaman hayati harus dikelola secara bijaksana untuk menjamin keberlangsungan ketersediaannya melalui upaya-upaya konservasi.

Konservasi sumberdaya alam hayati adalah upaya pengelolaan yang meliputi aspek pengawetan, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam hayati yang dilakukan secara lestari dan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Upaya tersebut dimaksudkan untuk tetap mempertahankan atau melestarikan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya sehingga secara terus-menerus dapat memberikan manfaatnya dalam mendukung kehidupan umat manusia. Upaya konservasi

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menjadi penting, karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur keanekaragaman hayati akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat, yang tidak sepadan jika dinilai dengan materi.

Penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam menyelenggarakan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Direktorat Jenderal KSDAE antara lain menjalankan mandat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Agar upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada

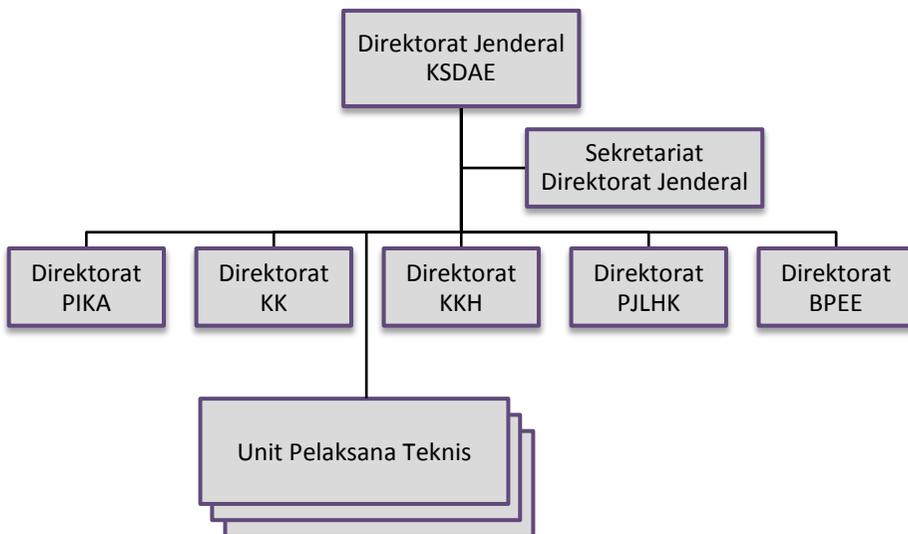
arah yang benar, mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumberdaya alam hayati, maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE tahun 2016 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Pedoman dan acuan dimaksud berupa Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016. Renja Direktorat Jenderal KSDAE disusun sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE.

B. Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal KSDAE adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengamanatkan bahwa Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam,

- pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah;
 6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
 7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; serta
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal KSDAE didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE; (2) Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (3) Direktorat Kawasan Konservasi; (4) Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati; (5) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi; (6) Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial; (7) Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam; serta (8) Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional. Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebagaimana bagan pada Gambar 1.



Gambar 1: Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE

Direktorat Jenderal KSDAE merupakan eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan jumlah unit pelaksana teknis (UPT) terbanyak. Direktorat Jenderal KSDAE didukung dengan 83 satuan kerja yang terdiri atas 6 unit eselon II di Pusat, 27 UPT konservasi sumber daya alam, serta 50 UPT taman nasional. Direktorat Jenderal KSDAE mengelola atau memangku kawasan konservasi seluas 27.108.486,54 hektar yang terbagi dalam 521 unit kawasan konservasi. Direktorat Jenderal KSDAE juga merupakan pemegang mandat pelaksanaan upaya konservasi spesies dan genetik, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi. Selain itu, dalam pengelolaan kawasan konservasi, Direktorat Jenderal KSDAE juga melaksanakan upaya-upaya pemanfaatan jasa-jasa ekosistem. Pada 521 unit kawasan konservasi di Indonesia, berbagai keunikan fenomena alam berpotensi sebagai obyek dan daya tarik wisata alam (*ecotourism*), potensi pemanfaatan sumberdaya air dari kawasan konservasi, pemanfaatan panas bumi, serta perdagangan simpanan karbon.

Untuk mewujudkan mandat pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengadopsi prinsip dan etika konservasi keanekaragaman hayati, Direktorat Jenderal KSDAE melakukan upaya-upaya sistematis yang secara garis besarnya dikelompokkan menjadi: (1) preservasi ekosistem dan habitat alami; (2) konservasi spesies dan genetik; (3) pengembangan keekonomian pemanfaatan jasa-jasa ekosistem; serta (4) perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi, ekosistem alami lainnya (ekosistem esensial dan *High Conservation Value Forest*), keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman sumberdaya genetik.

Apabila ditilik dari sisi mandat, tugas dan fungsinya, obyek yang dikelola serta fungsi dari masing-masing obyek, maka dapat diekstrak nilai strategis dari Direktorat Jenderal KSDAE. Nilai-nilai strategis tersebut antara lain:

1. **Pengelolaan dan Pemangkuhan Kawasan Hutan.** Direktorat Jenderal KSDAE merupakan satu-satunya unit kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memangku dan/atau mengelola secara langsung

kawasan hutan, yaitu kawasan hutan konservasi. Kawasan tersebut berjumlah 521 unit, seluas 27.108.486,54 hektar, dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah luasan tersebut sepadan dengan kurang lebih 21% dari luas total kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan di Indonesia;

2. **Kawasan Konservasi sebagai Benteng Terakhir.** Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara *mega biodiversity* di dunia, dan kawasan konservasi merupakan area yang terutama diperuntukkan bagi kepentingan preservasi lingkungan alami beserta segala sumberdaya yang ada di dalamnya, dalam hal ini keanekaragaman hayati. Pemanfaatan kawasan konservasi terutama hanya dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan jasa ekosistemnya, sehingga kelestariannya diharapkan dapat terjaga sebagai benteng terakhir tempat kelangsungan hidup keanekaragaman hayati Indonesia;

3. **Potensi Jasa Ekosistem.** Kawasan konservasi serta keanekaragaman hayati menyediakan berbagai jenis jasa ekosistem. Dari sisi ekonomi dan sosial, kawasan konservasi serta keanekaragaman hayati bernilai sangat tinggi. Apabila dikelola secara serius, dengan investasi dan upaya pengelolaan yang intensif, maka potensi jasa ekosistem tersebut dapat diubah menjadi potensi ekonomi riil yang sangat besar, dan belum lagi *multiplier effect* dari segala aktivitas pemanfaatan tersebut;

4. **Konvensi dan Kesepahaman Internasional.** Dengan julukan negara *mega biodiversity*, serta dengan hutan hujan tropisnya yang begitu luas, posisi Indonesia menjadi penting di kancah pergaulan internasional. Berbagai kesepahaman internasional terkait upaya konservasi keanekaragaman hayati telah pula diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, maka baik di dalam maupun di luar negeri, Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai peran yang signifikan dan patut mendapat perhatian.

C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Cita-cita pembangunan nasional bangsa Indonesia telah digariskan dalam konstitusi negara. Tujuan tersebut termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mencapai cita-cita mulia tersebut, pembangunan Indonesia perlu dilakukan secara terencana dengan menetapkan tahapan-tahapan pelaksanaannya berdasarkan prioritas. Pentahapannya disusun dengan bertolak dari sejarah, karakter sumberdaya yang dimiliki, serta tantangan yang sedang dan akan dihadapi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 merupakan periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJMN Tahun 2015-2019, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, menegaskan kembali bahwa pelaksanaan pembangunan Indonesia harus sesuai dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila dan Trisakti. Ideologi tersebut harus menjadi penuntun, penggerak, pemersatu, dan sekaligus sebagai bintang pengarah.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi, serta capaian pembangunan selama ini, maka Presiden Republik Indonesia menetapkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, pembangunan dilaksanakan dengan misi: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3)

Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun norma pembangunan yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah: (1) Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat; (2) Setiap upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

Visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 menjadi peta jalan seluruh kementerian dan/atau lembaga penyelenggara negara dalam merancang arah pembangunan, sasaran, dan strategi yang akan dilaksanakannya. Prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas pembangunan tahun 2015-2019 (Nawa Cita). Berdasarkan uraian rencana pelaksanaan Nawa Cita, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE terutama tertuang dalam agenda ketujuh.

Nawa Cita juga menguraikan sub agenda dan sasaran yang menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berangkat dari pandangan,

harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Agenda kebijakan nasional yang menjadi mandat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana amanat RPJMN Tahun 2015-2019, setidaknya tersurat dalam tiga agenda besar negara, yaitu: (1) agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (2) agenda meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; serta (3) agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Ketiga agenda pembangunan nasional tersebut dibagi lagi menjadi sembilan sub agenda, yang merupakan pengelompokan agenda-agenda tersebut sesuai dengan bidangnya, yang terdiri atas: (1) ketahanan air; (2) kesehatan; (3) ketahanan pangan; (4) ketahanan energi; (5) pariwisata; (6) produksi dan produktivitas yang berdaya saing; (7) pemberantasan penebangan liar; (8) pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; serta (9) tata kelola.

Untuk melaksanakan kebijakan pada sub agenda pengamanan ketahanan air, salah satu tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melalui strategi pemeliharaan dan pemulihan kualitas dan kuantitas sumberdaya air dan ekosistemnya, dengan melaksanakan upaya menurunkan koefisien regim sungai, mengurangi jumlah sampah yang masuk pada lingkungan air, meningkatkan kualitas air, meningkatkan perlindungan mata air melalui konservasi air, pembangunan embung dan dam pengendali, menurunkan luas lahan kritis di KPH dan DAS, serta melakukan pemulihan ekosistem di hutan produksi dan hutan konservasi.

Pada sub agenda kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas

menurunkan resiko kesehatan terhadap kanker yang diakibatkan oleh pencemaran logam berat dengan meningkatkan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah B3, serta pemulihan tanah terkontaminasi limbah B3. Selain itu, untuk menurunkan jumlah penderita ISPA akibat polusi udara, dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas udara, antara lain dengan menurunkan jumlah *hot spot* akibat kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan pada sub agenda ketahanan pangan, terutama dalam mendukung peningkatan produksi pangan, antara lain perlu dilakukan upaya melalui peningkatan luas lahan garapan untuk petani di areal kerja pengelolaan hutan untuk tanaman padi dan jagung seluas 267.000 hektar, penyediaan zona tradisional pada hutan konservasi sebagai areal untuk memungut hasil hutan hayati dan/atau memanfaatkan areal tersebut sebagai lahan untuk mata pencaharian masyarakat seluas 100.000 hektar, serta meningkatkan luas hutan untuk peran serta aktif masyarakat guna meningkatkan kesejahteraannya dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Desa seluas 12,7 juta hektar.

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan pada sub agenda ketahanan energi, beberapa hal yang akan ditempuh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dengan meningkatkan luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk biomassa seluas 100.000 hektar, meningkatkan pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan pembangkit listrik tenaga mini/mikro hidro (PLTMH) sebanyak 50 unit, meningkatkan jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi minimal sebanyak lima unit, serta meningkatkan pemanfaatan sampah dan limbah B3 untuk energi listrik.

Pada sub agenda pariwisata, saat ini Indonesia masih tertinggal jauh dalam hal kunjungan wisata dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, beberapa hal yang akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dengan berupaya meningkatkan jumlah

wisatawan nusantara yang berkunjung ke hutan konservasi sebanyak minimal 20 juta orang dalam lima tahun, serta meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke hutan konservasi sebanyak minimal 1,5 juta orang dalam lima tahun.

Sub agenda produksi dan produktivitas yang berdaya saing, dalam bidang kehutanan dilakukan melalui upaya peningkatan pengelolaan KPH sebanyak 629 unit KPH, peningkatan produksi kayu bulat dari hutan tanaman dan hutan alam sebesar 189 juta m³, meningkatkan jumlah produksi HHBK sebesar 225.000 ton, meningkatkan nilai ekspor sebesar USD 40,47 milyar, peningkatan ekspor tumbuhan dan satwa liar serta *bioprospecting* senilai Rp. 25 triliun, serta peningkatan persentase produksi HHBK dan sutera alam sebesar 15%.

Untuk mendukung sub agenda pemberantasan penebangan liar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat target lima tahun kedepan untuk menurunkan jumlah pelanggaran hukum lingkungan dan kehutanan sebesar 20% dari jumlah kasus pada tahun 2014. Sementara itu, untuk mendukung sub agenda pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, beberapa upaya yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dengan meningkatkan persentase peningkatan populasi spesies satwa terancam punah sebesar 10%, meningkatkan jumlah taman nasional dan kawasan konservasi lainnya yang memiliki *sanctuary* species terancam punah, meningkatkan jumlah kawasan ekosistem bernilai penting di luar kawasan hutan konservasi atau di luar kawasan hutan (6 ekosistem karst, 6 ekosistem mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, serta 30 taman kehati), meningkatkan jumlah koleksi spesies endemik lokal dan langka yang diupayakan konservasinya sebanyak 300 spesies, serta meningkatkan nilai indeks efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan Taman Buru sebesar minimal 70% (kategori baik).

Untuk sub agenda terakhir, yaitu tata kelola, hal-hal yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu meningkatkan persentase pengukuhan (penetapan) kawasan hutan menjadi 100%,

meningkatkan panjang tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000 km, meningkatkan jumlah KPH yang beroperasi sebanyak 629 KPH (347 KPHP, 182 KPHL, dan 100 KPHK), meningkatkan jumlah KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari sebanyak 20 KPHP, meningkatkan luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem sejumlah 500.000 hektar, meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan HKm, HD dan HTR seluas 12,7 juta hektar, serta meningkatkan jumlah wilayah kerja yang memiliki model pengelolaan hutan mangrove di dalam kawasan hutan sebanyak dua wilayah kerja sepanjang tahun.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan tiga kebijakan, yang terdiri atas dua kebijakan sebagai jawaban dari mandat agenda pembangunan nasional bidang ekonomi, yaitu kebijakan peningkatan hasil hutan dan kayu, serta kebijakan pengamanan ketahanan pangan, energi dan air. Adapun kebijakan sebagai respon atas agenda pembangunan pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yaitu kebijakan peningkatan konservasi dan tata kelola hutan. Dari ketiga arah kebijakan yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, masing-masing kebijakan memuat strategi untuk memberikan arahan pelaksanaan gagasan dari arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan tiga sasaran strategis dari sembilan sub agenda pembangunan, yang nantinya akan mendukung pelaksanaan tiga dari sembilan agenda pembangunan nasional. Strategi pencapaiannya ditetapkan melalui pelaksanaan 13 program dan 69 kegiatan dalam tahun 2015-2019.

13 program dan 69 kegiatan dimaksud menggambarkan pelaksanaan mandat dari masing-masing unit eselon I dan eselon II serta unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keterkaitan ke-13 program tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat

diuraikan dan diterjemahkan dari skema rantai nilai.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, peran dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator keberhasilan berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5;
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator keberhasilan berupa peningkatan kontribusi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup terhadap penerimaan devisa dan PNPB sebagai masukan terhadap PDB nasional; serta
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator keberhasilan berupa derajat keberfungsian ekosistem yang meningkat setiap tahun.

Sasaran strategis tersebut ditentukan dengan menurunkan strategi dari masing-masing arah kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi umum, harapan para pihak, capaian rencana strategis periode sebelumnya, isu-isu strategis, visi dan misi pemerintahan Kabinet Kerja 2015-2019, serta program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam

hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, berasaskan keserasian dan keseimbangan sebagaimana Gambar 8. Dengan demikian maka sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal KSDAE adalah kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati terpelihara dan terlindungi serta dimanfaatkan secara lestari untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Namun demikian, untuk menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka rumusan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu dari sisi pemanfaatan nilai keekonomian kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, serta dari sisi upaya perlindungan dan pengawetan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati itu sendiri.

Dari 3 sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Memanfaatkan potensi SDH dan LH secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (sasaran strategis kedua); serta (2) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (sasaran strategis ketiga).

Peran dalam pencapaian sasaran strategis kedua akan dibuktikan dan diukur dengan besaran penerimaan devisa negara dan penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi serta pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam. Adapun peran dalam pencapaian sasaran strategis ketiga antara lain akan dibuktikan dan diukur dengan peningkatan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (METT) serta peningkatan populasi 25 jenis satwa liar terancam punah prioritas.

D. Program dan Kegiatan

Keanekaragaman hayati merupakan bagian terpenting dari sumberdaya alam, yang berperan sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang tidak tergantikan, yang membuatnya menduduki peranan penting dan strategis bagi kehidupan seluruh umat manusia. Nilai keberadaan keanekaragaman hayati melingkupi seluruh aspek kehidupan di muka bumi ini, dan oleh karenanya dibutuhkan upaya konservasi secara optimal untuk menjaga keberlanjutannya, sehubungan dengan keberlanjutan kehidupan umat manusia sendiri.

Untuk mewujudkan mandat pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengadopsi prinsip dan etika konservasi keanekaragaman hayati, upaya sistematis yang perlu dilakukan secara garis besarnya dikelompokkan menjadi preservasi ekosistem dan habitat alami, konservasi keanekaragaman spesies serta sumberdaya genetiknya, pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dengan mengedepankan nilai keekonomian serta multiplier effect-nya dari sisi ekonomi dan sosial, serta dengan tetap melaksanakan perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati dan lingkungan.

Sejak abad ke-20, dalam konteks keanekaragaman hayati dan lingkungan, upaya konservasi lebih ditekankan pada aspek perlindungan, pengawetan, serta cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan lingkungan sehubungan dengan aspek pertama dan kedua. Embaran Direktorat Jenderal KSDAE berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, sebagaimana ditekankan dalam *World Conservation Strategy*, yaitu: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan sumber-sumber plasma nutfah; serta (3) pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Dari embaran tersebut, obyek yang dikelola oleh Direktorat Jenderal KSDAE antara lain terdiri dari kawasan konservasi, keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan konservasi, serta kawasan atau ekosistem yang bernilai esensial dan HCVF.

Pengelolaan keanekaragaman hayati dilaksanakan pada tiga tingkatan, yaitu pada level ekosistem, spesies, dan pada level sumberdaya genetik. Adapun pengelolaan keanekaragaman hayati juga berkaitan erat dengan pencapaian multi manfaatnya, yaitu manfaat ekonomi, sosial, serta terutama manfaat ekologi.

Dari uraian tersebut, maka rumusan program yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal KSDAE adalah Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Program ini akan melaksanakan rangkaian upaya-upaya yang merupakan penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem adalah peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi. Untuk memetakan keterkaitannya dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka rumusan sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem disesuaikan menjadi: (1) Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; serta (2) peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; (6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; (7) Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional; serta (8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*)

Foto: Iskandar



Bab II

CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun 2014

Pada era Kementerian Kehutanan, sebelum berganti nomenklatur menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE bernama Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Namun demikian, walaupun berubah nomenklaturnya, Direktorat Jenderal KSDAE tidak banyak berubah dari segi mandat, tugas, fungsi dan fokus aktivitasnya. Pembangunan bidang KSDAE difokuskan pada obyek kelolanya, yaitu kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, serta keanekaragaman sumberdaya genetik.

Pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan oleh Direktorat Jenderal PHKA sampai dengan tahun 2014 dikelompokkan menjadi enam bidang, yaitu: (1) Bidang

Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial; (2) Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati; (3) Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (4) Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan; (5) Bidang Penyidikan dan Pengamanan Hutan; serta (6) Bidang Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Tanggung jawab ketercapaian target pembangunan pada enam bidang tersebut diemban oleh masing-masing unit kerja setingkat eselon II di tingkat pusat sebagai penanggung jawab kegiatan, sedangkan pelaksanaan teknis operasionalnya di lapangan menjadi tanggung jawab UPT.

Capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PHKA sampai dengan tahun 2014 diuraikan sebagai berikut:

Bidang Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial

- a. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan Paradigma Pengelolaan Berbasis Resort (*Resort Based Management*)

Sebagai unit pemangku kawasan konservasi terkecil, resort merupakan ujung tombak pengelolaan. Petugas resort-lah yang sehari-hari berada di kawasan dan berinteraksi dengan

masyarakat di sekitarnya. Selama ini, aktifitas petugas resort masih didominasi oleh aspek pengamanan, sementara aspek lain dari pengelolaan kawasan konservasi, seperti pengelolaan potensi kawasan (plasma nutfah, jasa lingkungan dan wisata) serta aspek pengembangan masyarakat belum dapat dilakukan secara optimal.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, selama tahun 2010-2014, Direktorat Jenderal PHKA terus mengupayakan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi dengan paradigma pengelolaan berbasis resort (RBM). Dengan pola pengelolaan berbasis resort, potensi kawasan dan perkembangannya diharapkan dapat teridentifikasi dan selalu *up to date*. Dinamika sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang sangat berpengaruh akan selalu terpantau sehingga kawasan akan selalu terjaga dan terkelola dengan baik. Tujuannya adalah agar setiap UPT taman nasional dapat menjalankan pengelolaan kawasan secara efektif dan responsif terhadap berbagai persoalan yang mengancam eksistensi kawasan.

Aspek yang diukur dalam penilaian implementasi RBM di taman nasional meliputi kriteria prakondisi dan implementasi. Aspek prakondisi merupakan tahapan awal penyiapan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan alokasi anggarannya yang tersusun dalam suatu rencana implementasi. Aspek prakondisi terdiri dari tiga indikator, yaitu: (1) adanya tim kerja; (2) adanya rencana tahapan pencapaian implementasi RBM; serta (3) adanya pengelolaan data dan informasi. Kriteria Implementasi merupakan upaya pencapaian tahapan implementasi RBM. Aspek implementasi terdiri dari empat indikator, yaitu: (1) penataan wilayah kerja; (2) pemenuhan unsur kelembagaan resort; (3) pengelolaan data dan informasi; serta (4) evaluasi.

Dalam kurun waktu 2010-2014, jumlah taman nasional (TN) yang telah melaksanakan RBM sebanyak 48 UPT dari target 50 UPT. Dua UPT yang belum dapat mengimplementasikan RBM dengan baik adalah Balai TN Lorentz dan Balai TN Kepulauan Togeian. Kedua UPT tersebut terkendala oleh adanya konflik dengan pemerintah daerah terkait status TN Kepulauan Togeian, dan kondisi geografis TN Lorentz yang sangat luas dan sulit

dijelajahi, serta kurangnya jumlah personil.

b. Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Ekosistem Gambut

Kawasan gambut adalah suatu ekosistem rawa yang komponen-komponennya terdiri atas gambut, air, udara, biota, hidrotopografi, dan lapisan di bawah gambut yang saling mempengaruhi, membentuk keseimbangan yang dinamis serta tercermin oleh karakteristiknya yang unik dan rapuh. Ekosistem gambut memiliki peran penting dalam menopang kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Lahan gambut memiliki sifat yang unik karena terbentuk dari hasil pembusukan vegetasi yang berlangsung selama ribuan tahun. Dalam kurun waktu 2010-2014, tahapan-tahapan aktivitas ini telah dilaksanakan di tujuh lokasi, yaitu pada TN Danau Sentarum, TN Sembilang, TN Berbak, TN Sebangau, Provinsi Papua, Papua Barat, dan Riau.

c. Restorasi Ekosistem Kawasan Konservasi

Beberapa kawasan konservasi mengalami berbagai gangguan yang menyebabkan degradasi fungsinya. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas habitat tumbuhan dan satwa liar, yang pada akhirnya akan menyebabkan penurunan populasi hingga kepunahan. Untuk memulihkan kondisi tersebut diperlukan upaya restorasi yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekosistem sebagai sistem penyangga kehidupan. Restorasi ekosistem antara lain dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah Jepang dalam *Project on Capacity Building for Restoration of Ecosystems in Conservation Areas* (JICA-RECA Project). Restorasi ekosistem kawasan konservasi dilaksanakan pada lima lokasi target, seluas 455 Ha, yaitu pada TN Bromo Tengger Semeru (40 Ha), TN Gunung Merapi (50 Ha), TN Gunung Ciremai (75 Ha), TN Manupeu Tana Daru (90 Ha), serta TN Sembilang (200 Ha). Sampai dengan tahun 2014, upaya

restorasi dilaksanakan pada areal seluas 520,1 Ha.

d. Penanganan Perambahan Kawasan Hutan pada 12 Provinsi Prioritas

Konflik dan tekanan lahan dalam berbagai bentuk merupakan persoalan yang nyata dalam pengelolaan kawasan konservasi. Konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi adalah segala aktifitas yang berinteraksi dengan kawasan konservasi dan hutan lindung secara *illegal*, dengan acuan umum merujuk terutama pada Pasal 50 Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berdasarkan *roadmap* penanganan perambahan pada 12 provinsi prioritas (Keputusan Direktur KKBHL Nomor: SK.21/KKBHL-6/2013), upaya yang dilakukan dimulai dengan identifikasi *open area* sampai dengan fasilitasi penyelesaian penanganan perambahan. Penyelesaian konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung dilakukan secara holistik,

dan UPT menjadi ujung tombaknya, bekerjasama dengan para mitranya baik kalangan pemerintah, masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat. Secara umum penyelesaian dimaksud dapat berupa tindakan hukum, kesepakatan bersama para pihak atau rasionalisasi kawasan konservasi.

Berdasarkan data dasar yang dihimpun dari UPT TN dan KSDA pada tahun 2009, luas area kawasan konservasi yang dikonfirmasi mengalami perambahan mencapai angka 461.367,89 Ha. Dalam periode Renstra Direktorat Jenderal PHKA 2010-2014, target penurunan konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung dalam lima tahun adalah sebesar 5% dari luas total yang dirambah (asumsi rata-rata 1% per tahun) atau sekitar 25.000 ha dari total areal konflik. Sampai dengan tahun 2014, penanganan konflik dan tekanan dapat diselesaikan seluas 29.951,54 Ha atau 119,81% dari targetnya. Data penyelesaian konflik kawasan konservasi pada tahun 2010-2014 diuraikan dalam Tabel 2.

Tabel 1. Perkembangan Penyelesaian Konflik Kawasan Konservasi

| No. | Lokasi Kawasan | 2010 (Ha) | 2011 (Ha) | 2012 (Ha) | 2013 (Ha) | 2015 (Ha) | Total (Ha) |
|-----|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. | TN Way Kambas | 6.000 | - | - | - | - | 6.000 |
| 2. | TN Gunung Ciremai | 2.300 | - | - | - | - | 2.300 |
| 3. | TN Kerinci Seblat | 200 | - | 2.000 | - | - | 2.200 |
| 4. | TN Gunung Leuser | 500 | 1.000 | - | - | - | 1.500 |
| 5. | TN Bukit Barisan Selatan | - | 5.000 | 4.000 | - | - | 9.000 |
| 6. | CA Kamojang | - | 1.000 | - | - | - | 1.000 |
| 7. | KSDA Sumatera Utara | - | - | 200 | - | - | 200 |
| 8. | KSDA Sumatera Selatan | - | - | 300 | - | - | 300 |
| 9. | TN Babul | - | - | 400 | - | - | 400 |
| 10. | TN Rawa A. Watumohai | - | - | 1.200 | - | - | 1.200 |
| 11. | TWA Sibolangit | - | - | - | 0,46 | - | 0,46 |
| 12. | TWAL Padamarang | - | - | - | 2.459,24 | - | 2.459,24 |
| 13. | BTN Bukit 30 | - | - | - | - | 1.400 | 1.400 |
| 14. | SM Cikepuh | - | - | - | - | 251 | 251 |
| 15. | SM Cibanteng | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 16. | SM Gunung Sawal | - | - | - | - | 68,76 | 68,76 |

| No. | Lokasi Kawasan | 2010 (Ha) | 2011 (Ha) | 2012 (Ha) | 2013 (Ha) | 2015 (Ha) | Total (Ha) |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 17. | SM Kateri | - | - | - | - | 1.557,15 | 1.557,15 |
| 18. | TN Bogani Nani Wartabone | - | - | - | - | 98,93 | 98,93 |
| Jumlah | | 9.000 | 7.000 | 8.100 | 2.459,70 | 3.391,84 | 29.951,54 |

Sumber: Direktorat KKBHL (2014)

e. Pengembangan Ekosistem Esensial

Penetapan dan pengelolaan ekosistem esensial sampai dengan tahun 2014 dilaksanakan di 17 kawasan, sebagaimana target yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010. Sampai dengan tahun 2014, kawasan dimaksud dikelola dengan kesepakatan para pihak yang terkait. Namun demikian, hingga akhir tahun 2014 belum satupun dari kawasan tersebut yang telah dikelola atau dipangku oleh lembaga pemerintah yang permanen, sehingga belum ada lembaga yang bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaannya di lapangan. Pengembangan pengelolaan ekosistem esensial masih akan dilanjutkan hingga penetapan lembaga pengelolanya secara permanen pada periode tahun 2015-2019.

f. Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga Kawasan Konservasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dijelaskan bahwa wilayah yang berbatasan dengan KSA dan KPA ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Penyangga. Wilayah yang

ditetapkan sebagai Daerah Penyangga dapat berupa kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, hutan hak, tanah negara bebas, atau tanah yang dibebani hak, dengan tujuan untuk menjaga keutuhan kawasan konservasi.

Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya terdapat 3.746 desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan konservasi, yang kemudian berfungsi sebagai daerah penyangga. Agar aktivitas ekonomi dan budaya masyarakat di daerah penyangga tidak bertentangan dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi, maka pemerintah, dalam hal ini pengelola kawasan konservasi, juga diharapkan melaksanakan pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga. Targetnya adalah peningkatan pendapatan masyarakat di daerah penyangga tersebut. Dengan mempertimbangkan jumlah desa di sekitar kawasan konservasi dan jumlah model desa konservasi yang cukup banyak, maka pembinaan difokuskan pada beberapa desa target. Berdasarkan data yang dihimpun dan penghitungan peningkatan pendapatan masyarakat pada desa-desa dan UPT yang menjadi target, maka diperoleh nilai keberhasilan 217,45% dari target peningkatan sebesar Rp. 800.000,- per bulan untuk setiap kepala keluarga.

Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati

a. Penyelenggaraan Skema DNS

Skema *Debt for Nature Swap* (DNS) adalah skema pendanaan alternatif melalui pelaksanaan program konservasi keanekaragaman hayati. Skema pendanaan alternatif dimaksud disepakati sebagai penghapusan utang Indonesia kepada negara lain dengan melaksanakan

upaya konservasi. Selama periode tahun 2010-2014 ditargetkan dua kegiatan DNS, yaitu DNS *The Tropical Forest Conservation Act* (TFCA) yang dikerjasamakan dengan pemerintah Amerika, serta DNS IV yang dikerjasamakan dengan pemerintah Jerman. Sampai dengan akhir tahun 2014, program yang telah dijalankan dengan

menggunakan skema DNS tersebut adalah DNS TFCA, sedangkan DNS IV belum dapat dijalankan karena tidak tercipta kesepakatan dengan pemerintah Jerman terkait mekanisme pembiayaannya.

TFCA Sumatera atau disebut juga Aksi Pelestarian Hutan Tropis Sumatera, mengelola dana yang bersumber dari pengalihan pembayaran utang pemerintah Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat. Dana hibah untuk hutan Sumatera ini dirancang untuk meningkatkan upaya konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam sekaligus membangun sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal sekitar hutan. Program prioritas TFCA Sumatera meliputi: (1) penetapan, restorasi, perlindungan dan pemeliharaan kawasan konservasi dan kawasan lindung lainnya; (2) pengembangan dan implementasi pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis ilmiah, termasuk praktek pengelolaan lahan dan ekosistem; (3) program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan, teknis dan pengelolaan bagi individu dan institusi dalam konservasi; (4) restorasi, perlindungan atau pemanfaatan secara lestari spesies tumbuhan dan satwa; (5) penelitian dan identifikasi tanaman obat untuk menanggulangi penyakit manusia dan meningkatkan kesehatan; serta (6) pengembangan dukungan bagi kehidupan masyarakat di sekitar hutan dengan memperhatikan perlindungan hutan tropis.

TFCA Sumatera menetapkan 13 kawasan konservasi sebagai lokasi prioritas, yaitu: (1) Bentang alam Kerumutan-Semenanjung Kampar-Senepis; (2) Kawasan Hutan Batang Toru dan Taman Nasional Batang Gadis; (3) Ekosistem Kerinci Seblat; (4) Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Gunung Leuser; (5) Kawasan Hutan Bukit Barisan Selatan; (6) Sembilang-Berbak; (7) Taman Nasional Siberut dan Kepulauan Mentawai; (8) Ekosistem Tesso Nilo; (9) Taman Nasional Bukit Tiga Puluh; (10) Taman Nasional Way Kambas; (11) DAS Toba Barat; (12) Dataran Rendah dan Hutan

Tropis Angkola; serta (13) Hutan warisan Ulu Masen/ Seulawah.

b. Penangkaran dan Pemanfaatan Jenis Keanekaragaman Hayati

Penangkaran adalah kegiatan pengembangbiakan atau perbanyakkan atau pembesaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Dalam rangka pengembangan penangkaran, dilakukan upaya-upaya antara lain pendelegasian wewenang perizinan penangkaran TSL generasi F2 dan seterusnya kepada UPT KSDA, peningkatan penyadartahuan masyarakat tentang penangkaran dan peredaran pemanfaatan TSL, dan penyempurnaan peraturan perundangan terkait penangkaran. Jumlah penangkar sampai dengan 2014 adalah sebanyak 779 unit.

Tata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar bertujuan untuk menciptakan tertib peredaran untuk kelestarian populasi TSL. Tata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan melalui pengendalian kegiatan pengambilan, penangkapan, pengumpulan, pemeliharaan, pengangkutan specimen TSL. Sampai dengan tahun 2014 terdapat sebanyak 232 unit pengedar TSL yang diberikan izin oleh Direktorat Jenderal PHKA selaku *Management Authority Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES).

Lembaga Konservasi (LK) adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (eksitu). LK mempunyai fungsi: (1) pengembangbiakan terkontrol dan/atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya; (2) tempat pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi insitu; serta (3) sarana rekreasi yang sehat serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. LK dapat berbentuk pusat

penyelamatan satwa, pusat latihan satwa khusus, pusat rehabilitasi satwa, kebun binatang, taman safari, taman satwa, taman satwa khusus, museum zoologi, kebun botani, taman tumbuhan khusus, serta arboretum. Sampai dengan tahun 2014, Direktorat Jenderal PHKA telah memberikan izin untuk 59 unit LK.

c. Kerjasama dan Konvensi Internasional Bidang KKH

Indonesia sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi namun dengan laju degradasi yang tinggi pula, mempunyai kepentingan yang besar untuk menjalin kerjasama di bidang konservasi keanekaragaman hayati. Kerjasama dimaksud dilakukan di tingkat internasional maupun regional. Di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD)*, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES)*, *Convention on Wetlands of International*

Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention), *Convention Concerning The Protection of The World Cultural and Natural Heritage (WHC)*. Di tingkat regional, Direktorat Jenderal PHKA menjadi *focal point* untuk *ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity (AWGNBC)*. Indonesia juga menjadi *signatory party* pada Kesepakatan *Heart of Borneo (HoB)*, *The Indian Ocean and South East Asia (IOSEA)*, *East Asian Australasian Flyway Partnership (EAAP)*, serta *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*. Sampai dengan tahun 2014, Direktorat Jenderal PHKA aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan terkait kerjasama dan konvensi internasional tersebut. Pada Tahun 2014, Direktorat Jenderal PHKA berpartisipasi dalam penyiapan posisi Delegasi RI dalam *Animal dan Plant Committee*, Bimtek CITES, pelaksanaan CITES, CBD, Ramsar, WHC Regional dan Sub Regional, serta penyusunan *National Report*.

Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air

Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air, pada awalnya merupakan kerjasama antara pemangku kawasan konservasi dengan pihak ketiga. Pasca terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 64 tahun 2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, kerjasama dimaksud kemudian dikonversi menjadi perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air. Izin diberikan dalam bentuk IPA atau Izin Pemanfaatan Air, IPEA atau Izin Pemanfaatan Energi Air (non komersial), IUPA atau Izin Usaha Pemanfaatan Air, serta IUPEA atau Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air.

Sampai dengan akhir tahun 2014, telah diterbitkan sebanyak 85 izin pemanfaatan jasa lingkungan air. Izin tersebut terdiri dari 56 IPA, satu IPEA, dan 28 *MoU*. 28 dokumen *MoU* dimaksud

masih berlaku dan belum dikonversi menjadi IPA dan IPEA. Selain itu, terdapat pula 8 dokumen *MoU* yang masa berlakunya telah habis. Tiga permohonan IUPA dan tujuh permohonan IUPEA, hingga akhir tahun 2014 masih dalam proses administrasi perizinan.

b. PNBP Bidang Pariwisata Alam

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang pengusaha pariwisata alam merupakan salah satu penerimaan negara dari bidang pemanfaatan potensi kawasan konservasi di sektor kehutanan. PNBP bidang pariwisata alam meliputi Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA), Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam (MOWA) atau karcis masuk, Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA), dan Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam. Pada tahun 2014, PNBP bidang pariwisata alam adalah sebesar Rp. 68.777.475.354,-. Jika dibandingkan PNBP

tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 5.946.142.157,- maka terjadi peningkatan sebesar 1.039,86%. Jika dibandingkan dengan target PNBPN bidang pariwisata alam di tahun 2014, maka capaiannya melampaui target sebesar kurang lebih 50%. Tingginya peningkatan PNBPN pada tahun 2014, antara lain disebabkan oleh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, dimana terdapat peningkatan yang cukup signifikan atas pungutan bidang pariwisata alam.

Perkembangan PNBPN bidang pariwisata alam dalam kurun waktu tahun 2010-2014 terus meningkat secara signifikan. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya peningkatan minat wisatawan untuk berkunjung ke kawasan konservasi, adanya pembukaan obyek dan daya tarik wisata alam baru, adanya peningkatan aksesibilitas ke kawasan konservasi, adanya pengembangan fasilitas kunjungan wisata ke kawasan konservasi, semakin meningkatnya upaya promosi dan informasi kawasan konservasi, dan lain sebagainya.

Dalam tahun 2010-2014, total PNBPN bidang pariwisata alam yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal PHKA adalah sebesar Rp. 172.448.558.241,- atau rata-rata sebesar Rp. 34.489.711.648,- per tahunnya. Apabila dibandingkan dengan PNBPN bidang pariwisata alam pada tahun 2008, maka rata-rata PNBPN per tahun tersebut mengalami kenaikan hampir enam kali lipat dibandingkan dengan penerimaan di tahun 2008. Penerimaan tersebut diharapkan dapat lebih meningkat lagi di masa-masa yang akan datang, agar manfaat ekonomi kawasan konservasi dapat lebih terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan konservasi juga diharapkan akan terus meningkat. Hal tersebut tentu saja harus dibarengi dengan peningkatan investasi oleh pemerintah, serta pemberian insentif bagi

para investor swasta yang bergerak dalam usaha pariwisata alam.

c. Demonstration Activity REDD+

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan/ REDD) merupakan sebuah mekanisme untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dengan cara memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang melakukan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Pengurangan emisi dengan mencegah deforestasi yang diupayakan diperhitungkan sebagai kredit. Jumlah kredit karbon yang diperoleh dalam waktu tertentu dapat dijual di pasar karbon. Sebagai alternatif, kredit yang diperoleh dapat diserahkan kepada lembaga pendanaan yang dibentuk untuk menyediakan kompensasi finansial bagi negara peserta yang melakukan konservasi hutannya. Skema REDD+ memperbolehkan konservasi hutan untuk berkompetisi secara ekonomis dengan berbagai kegiatan ekonomi lainnya yang memicu deforestasi.

Dalam menjaga kawasan dari peningkatan degradasi dan deforestasi serta memelihara stock dan serapan karbon, dilakukan patroli pengamanan untuk menjaga stok karbon, identifikasi potensi lingkungan dan keanekaragaman jenis serta analisis pendukung kelestarian kawasan, survei dampak pelaksanaan kegiatan REDD, serta bantuan teknis/peralatan untuk masyarakat. Sampai dengan tahun 2014, *Demonstration Activity* (DA) REDD+ telah diupayakan pada 11 kawasan taman nasional, namun hanya dapat terealisasi pada 4 kawasan, yaitu TN Berbak, TN Sebangau, TN Tesso Nilo, dan TN Meru Betiri. Namun demikian, capaian tersebut telah melampaui target yang hanya pada dua kawasan konservasi.

- d. Pemberdayaan Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP)

KK, KPA, dan KSM/KP merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai peran penting untuk ikut menjaga, melestarikan, dan mencintai lingkungan alami. Pada tahun 2009, jumlah KK sebanyak 38.834 orang, KPA sebanyak 1.317 kelompok, dan KK sebanyak 84 kelompok. Sampai dengan tahun 2014, jumlah KK sebanyak 43.190 orang, KPA sebanyak 2.401 kelompok, dan KSM/KP sebanyak 84 kelompok. Adapun sampai dengan tahun 2014, jumlahnya KK meningkat sebesar 11,22% atau sebanyak 4.356 orang, dan jumlah KPA meningkat sebesar 82,31% atau sebanyak 1.084 kelompok.

Di antara KK, KPA, dan KSM/KP yang sudah dibentuk, hanya sebagian yang terus diberdayakan dan merupakan mitra bina cinta alam yang aktif. Berdasarkan laporan pelaksanaan aktivitasnya, KK, KPA, dan KSM/KP yang aktif adalah sebanyak 8.986 orang/kelompok dimana kader yang aktif sebanyak 7.035 orang, KPA yang aktif sebanyak 1.884 kelompok dan KSM/KP sebanyak 17 kelompok. Pemberdayaan mitra bina cinta alam oleh Direktorat Jenderal PHKA dilaksanakan dalam bentuk kegiatan jasa pemandu wisata alam, pameran konservasi, patroli pengamanan, kebakaran hutan (MPA), serta pelaksanaan aktivitas dalam rangka

peringatan hari besar nasional dan lain sebagainya.

- e. Pengembangan Informasi, Promosi, dan Pemasaran Konservasi SDA

Dari sekian banyak potensi obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA) yang ada pada kawasan konservasi, hanya sebagian kecil yang telah dikenal oleh masyarakat luas. Untuk itu, diperlukan upaya promosi dalam rangka penyebarluasan informasi kepada publik mengenai potensi-potensi wisata yang ada di kawasan konservasi. Dalam tahun 2010-2014, Direktorat Jenderal PHKA antara lain telah melakukan beberapa upaya, yaitu:

- 1) Pembuatan Peta ODTWA di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- 2) Pengelolaan Website Direktorat PJLKKHL;
- 3) Pembuatan Bulletin Konservasi Alam;
- 4) Pembuatan materi promosi dan pemasaran konservasi alam;
- 5) Pameran dan promosi konservasi alam dalam ajang Deep dan Extreme Indonesia, Indo-Green Forestry Expo, Majapahit Travel Fair, serta Bali Tourism Trade Investment (Bali TTI) Expo;
- 6) Pameran dan promosi konservasi alam dalam ajang pameran pembangunan di berbagai provinsi dan kabupaten/kota; serta
- 7) Promosi konservasi alam melalui media massa.

Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan

Kebakaran merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang paling parah dan sangat merugikan. Pemulihan kerusakan hutan akibat kebakaran memerlukan waktu yang lama dan tentu saja biaya yang besar. Oleh karenanya dilakukan berbagai upaya dan tindakan melalui kegiatan pemantauan, pengendalian di lapangan, pengembangan sistem serta pemantauan dampak kebakaran, untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran.

Salah satu penyebab utama kebakaran hutan adalah faktor manusia yang melakukan aktifitas pembakaran hutan dan lahan untuk pembukaan areal perkebunan dan pertanian. Kondisi ini akan semakin parah bila dilakukan di musim kemarau yang panjang dan disertai angin yang kencang. Akibatnya kebakaran yang terjadi akan semakin meluas dan menimbulkan kerusakan yang hebat. Seriusnya masalah kebakaran hutan di Indonesia menjadi perhatian pemerintah, bahkan dalam Kabinet Pembangunan Bersatu Jilid II, kegiatan

pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu prioritas nasional. pengendalian kebakaran hutan dan lahan antara lain dilaksanakan melalui pemantauan hot spot, pemadaman, serta penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.

Pemantauan *hot spot* (titik panas) bertujuan untuk memperoleh informasi dan indikasi awal kemungkinan terjadinya kebakaran di suatu lokasi, agar kemudian dapat segera dilakukan tindakan dan antisipasi di lapangan. Kegiatan pemantauan *hot spot* telah dilaksanakan setiap hari melalui *mailling-list* Si Pongi kepada anggota *mailling-list* dari UPT Direktorat Jenderal PHKA, Dinas Kehutanan Provinsi, dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. Data tersebut berupa jumlah *hot spot*, koordinat *hot spot* yang diintegrasikan dengan peta dasar (fungsi lahan) yang bersumber dari Direktorat Jenderal Planologi, untuk segera dilakukan upaya tindak lanjut di lapangan.

Dalam tahun 2010-2014, target penurunan *hot spot* adalah 67,2% dari jumlah rerata *hot spot* tahun 2005-2009. Dengan demikian, batas maksimal *hot spot* selama 2010-2014 adalah sebanyak 158.297 titik atau rata-rata 31.659 titik per tahun. Realisasi penurunan *hot spot* dalam tahun 2010-2014 adalah sebanyak 119.396 titik atau rata-rata 23.879 titik per tahun. Skenario target penurunan jumlah *hot spot* tidak sepenuhnya dapat tercapai setiap tahun, namun demikian target secara kumulatif dapat berkurang. Dilihat fungsi kawasan, sebaran *hot spot* paling besar terdapat di kawasan non hutan, yang mencapai 72,69%. Jumlah *hot spot* terbesar terdapat di APL/lahan yaitu mencapai 68,50%, jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah *hot spot* yang ditemukan di kawasan hutan. Adapun upaya lain berupa pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta penanganan pasca kebakaran dapat dilakukan secara optimal oleh seluruh perangkat Direktorat Jenderal PHKA di lapangan.

Bidang Penyidikan dan Pengamanan Hutan

a. Penyelesaian Tunggakan Perkara

Kasus-kasus tindak pidana kehutanan (tipihut) yang belum terselesaikan pada tahun berjalan akan menjadi tunggakan dan diselesaikan serta dipantau di tahun-tahun berikutnya. Seluruh tunggakan perkara yang ada sejak tahun 2009 secara bertahap harus diselesaikan dengan target sebanyak 25% per tahun sampai dengan P21 (berkas kasus diterima oleh Kejaksaan RI untuk kemudian dituntut di pengadilan). Pada tahun 2014, tunggakan kasus tipihut tahun 2009-2013 yang belum dapat diselesaikan adalah sebanyak 339 kasus. Tunggakan kasus tersebut terdiri atas 121 kasus *illegal logging*, 71 kasus perambahan kawasan hutan, 25 kasus *wildlife crime*, 79 kasus penambangan ilegal, dan 43 kasus kebakaran hutan. Tunggakan kasus tersebut berhasil diselesaikan sebanyak 86 kasus sampai dengan tahun 2014 (25,37%).

b. Penyelesaian Kasus Baru Tindak Pidana Kehutanan

Luas kawasan hutan di Indonesia mencapai lebih dari 133 juta ha, dimana 21% atau sekitar 27,1 juta ha merupakan kawasan konservasi. Namun demikian, kawasan hutan tersebut tidak lepas dari ancaman deforestasi dan degradasi. Saat ini, selain *illegal logging*, modus deforestasi dan degradasi hutan juga sudah bergeser pada pola eksploitasi sumberdaya alam seperti kegiatan perkebunan dan pertambangan di dalam kawasan hutan secara ilegal. Eksploitasi hasil hutan non kayu seperti perburuan dan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL) juga semakin marak. Direktorat Jenderal PHKA selaku penanggungjawab upaya perlindungan hutan telah melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku perusakan hutan dan peredaran ilegal hasil hutan.

Berdasarkan data register perkara pada Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan, diketahui bahwa pada tahun 2014 kategori kasus yang

paling banyak ditangani adalah perambahan kawasan hutan, yaitu sebanyak 30 kasus atau 37,97% dari jumlah kasus yang ada. Kasus illegal logging sebanyak 27 kasus atau 30%. Dari 30 kasus perambahan, 27 kasus dapat diselesaikan hingga proses P21 dan tiga kasus masih dalam proses penyidikan. Adapun untuk 27 kasus *illegal logging*, 26 diantaranya diselesaikan hingga proses P21 dan hanya tersisa satu kasus yang menjadi tunggakan. Untuk 18 kasus TSL ilegal, 15 kasus diantaranya telah diselesaikan sampai dengan P21 dan tiga kasus masih dalam proses penyelesaian.

c. Penyelesaian Kasus Hukum Perambahan Kawasan Konservasi

Perambahan merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam keberadaan sebagian besar kawasan konservasi di Indonesia. Penyelesaian kasus hukum perambahan bertujuan membebaskan kawasan konservasi dari aktivitas ilegal dan pendudukan lahan kawasan konservasi. Dari 247 kasus hukum perambahan kawasan konservasi yang terjadi selama tahun 2010-2014, 151 kasus diantaranya (61,31%) dapat diselesaikan hingga proses P21. Sisa dari kasus yang belum terselesaikan tersebut masih dalam penanganan penyidik, baik oleh PPNS Kementerian Kehutanan maupun oleh penyidik Polri.

Bidang Dukungan Manajemen

a. Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Upaya ini antara lain dilakukan melalui penyusunan dokumen program dan penganggaran pada sejumlah 116 satuan kerja, sesuai dengan jumlah satker lingkup Direktorat Jenderal PHKA, yang terdiri dari 6 satker pusat, 77 satker UPT, dan 33 Dinas Provinsi (dekonsentrasi). Dokumen-dokumen dimaksud antara lain terdiri dari rencana strategis, rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen penetapan kinerja, Petunjuk Teknis Penyusunan RKA Bidang PHKA, Standar Kegiatan dan Biaya Bidang PHKA, monitoring dan evaluasi, serta laporan tahunan dan laporan kinerja.

b. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Pejabat Fungsional

Pejabat fungsional Polisi Kehutanan (Polhut) dan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) merupakan ujung tombak pelaksana kegiatan Direktorat Jenderal PHKA di lapangan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugasnya di lapangan diperlukan pendidikan dan pelatihan. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Polhut dan PEH ini ditargetkan sebanyak 5.000 orang

selama lima tahun. Target-target tersebut pada umumnya dapat dipenuhi dengan baik, walaupun tidak seluruhnya menggunakan sumberdaya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal PHKA.

c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan UPT, Direktorat Jenderal PHKA berupaya mengklasifikasikan kondisi UPT di daerah. Ada tiga kategori yang digunakan, yaitu baik (lengkap), cukup baik dan kurang. Beberapa parameter yang digunakan untuk mengklasifikasikan UPT dalam masing-masing kategori tersebut, antara lain: ketersediaan gedung kantor Balai besar/balai, bidang/seksi dan resort/pos jaga, sarana transportasi dan komunikasi, serta peralatan perkantoran. Sampai dengan tahun 2014, seluruh UPT Direktorat Jenderal PHKA pada umumnya telah berpredikat baik (lengkap), dan sisanya masih berpredikat cukup baik. Hal tersebut antara lain dikarenakan oleh ketersediaan sumber pembiayaan serta prioritas dari masing-masing UPT dalam menggunakan alokasi pembiayaannya.

d. Dokumen Perundangan Bidang PHKA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal PHKA memerlukan perangkat regulasi dan kebijakan sebagai pedoman dan arahan oleh seluruh unit kerjanya. Dalam kurun waktu 2010-2014, telah diterbitkan sebanyak 93 dokumen peraturan perundang-undangan bidang KSDAE, yang terdiri atas tiga peraturan pemerintah, 39 peraturan Menteri Kehutanan, dan 51 peraturan Direktur Jenderal PHKA. Namun demikian, masih banyak kalangan yang menilai bahwa Direktorat Jenderal PHKA masih bekerja dengan perangkat peraturan perundangan (norma, standar, prosedur, dan kriteria/NSPK) yang minim. Selain minim, banyak pula diantara

regulasi dan kebijakan tersebut yang telah *out of date*.

e. Kerjasama dan Kemitraan

Dalam rangka mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati, dikembangkan kerjasama dan kemitraan bidang PHKA. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi "gap" input dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal PHKA, khususnya dalam hal pendanaan serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Tujuannya adalah agar upaya KSDAE dapat terlaksana optimal. Dalam tahun 2010-2014, dokumen kerjasama yang telah disepakati dengan pihak terkait sebanyak 20 dokumen.

B. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2015

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari periode perencanaan jangka menengah tahun 2015-2019. Dengan demikian maka sasaran dan target kinerja tahun 2015 mengacu telah pada Rencana Strategis

Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019. Adapun prognosis capaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. Prognosis Capaian Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015

| Kode | Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK | Target Tahun 2015 | Prognosis Capaian Tahun 2015 |
|------------------|---|-------------------|------------------------------|
| 029.05.08 | Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | | |
| | <i>Sasaran Program 1: Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati</i> | | |
| 1. | Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar) | 50 KK | 50 KK |
| 2. | Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit | 20 Unit | 12 Unit |
| 3. | Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i>) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 | 2% | 2% |
| 4. | Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit | 13 Unit | 13 Unit |
| 5. | Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) | 7 Paket Data | 7 Paket Data |
| | <i>Sasaran Program 2: Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati</i> | | |

| Kode | Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK | Target Tahun 2015 | Prognosis Capaian Tahun 2015 |
|-------------|--|-------------------|------------------------------|
| 1. | Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Triliun | Rp 5 T | Rp 5 T |
| 2. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara | 250.000 Orang | 250.000 Orang |
| 3. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara | 3.500.000 Orang | 3.500.000 Orang |
| 4. | Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan <i>Geothermal</i> sebanyak 5 Unit) | 25 Unit | 25 Unit |
| 5420 | Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam | | |
| | <i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam</i> | | |
| 1. | Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang disusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok | 30 Dokumen | 30 Dokumen |
| 2. | Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 100 Unit | 3 Unit |
| 3. | Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliabel pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 521 Paket Data | 44 Paket Data |
| 4. | Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK | 20 Unit | 12 Unit |
| 5. | Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS | 20 PKS | 20 PKS |
| 5421 | Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi | | |
| | <i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru</i> | | |
| 1. | Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 50 Unit | 50 Unit |
| 2. | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang disusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan | 30 Dokumen | 30 Dokumen |
| 3. | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha | 10.000 Ha | 10.000 Ha |
| 4. | Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa | 77 Desa | 77 Desa |
| 5. | Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha | 10.000 Ha | 10.000 Ha |
| 6. | Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK | 20 Unit | 12 Unit |
| 7. | Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi |

| Kode | Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK | Target Tahun 2015 | Prognosis Capaian Tahun 2015 |
|-------------|---|-------------------|------------------------------|
| 5422 | Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik | | |
| | <i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik</i> | | |
| 1. | Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 | 2% | 2% |
| 2. | Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013 | 2 Spesies | 2 Spesies |
| 3. | Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit | 10 Unit | 10 Unit |
| 4. | Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Trilyun | Rp 5 T | Rp 5 T |
| 5. | Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M | Rp 10 M | Rp 10 M |
| 6. | Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi | 7 Paket Data | 7 Paket Data |
| 7. | Jumlah <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC | 1 PIC | 1 PIC |
| 8. | Jumlah hasil <i>assessment</i> Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik | 4 PRG | 4 PRG |
| 9. | Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi | 1 Unit | 1 Unit |
| 10. | Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit | 10 Unit | 10 Unit |
| 5423 | Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi | | |
| | <i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi</i> | | |
| 1. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara | 250.000 Orang | 250.000 Orang |
| 2. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara | 3.500.000 Orang | 3.500.000 Orang |
| 3. | Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 | 20 Unit | 20 Unit |
| 4. | Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit | 5 Unit | 5 Unit |
| 5. | Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit | 5 Unit | 5 Unit |
| 6. | Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit | - | - |

| Kode | Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK | Target Tahun 2015 | Prognosis Capaian Tahun 2015 |
|-------------|--|-------------------|------------------------------|
| 7. | Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+</i> pada 2 Unit KK | - | - |
| 5424 | Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial | | |
| | <i>Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial</i> | | |
| 1. | Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati) | 13 KEE | 3 KEE |
| 2. | Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data | 3 Paket Data | 1 Paket Data |
| 3. | Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen |
| 4. | Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan | - | - |
| 5. | Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion | - | - |
| 6. | Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies | 60 Spesies | 60 Spesies |
| 5425 | Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati | | |
| | <i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan</i> | | |
| 1. | Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok | 30 Dokumen | 30 Dokumen |
| 2. | Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 100 Unit | 100 Unit |
| 3. | Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 521 Paket Data | 521 Paket Data |
| 4. | Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK | 20 Unit | 20 Unit |
| 5. | Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS | 20 PKS | 20 PKS |
| 6. | Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 50 Unit | 50 Unit |
| 7. | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan | 30 Dokumen | 30 Dokumen |
| 8. | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha | 10.000 Ha | 10.000 Ha |
| 9. | Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun | 77 Desa | 77 Desa |

| Kode | Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK | Target Tahun 2015 | Prognosis Capaian Tahun 2015 |
|-------------|---|-------------------|------------------------------|
| 10. | Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK | 20 Unit | 20 Unit |
| 11. | Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi |
| 12. | Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 | 2% | 2% |
| 13. | Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013 | 2 Spesies | 2 Spesies |
| 14. | Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M | Rp 10 M | Rp 10 M |
| 15. | Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi | 7 Paket Data | 7 Paket Data |
| 16. | Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit. | 10 Unit | 10 Unit |
| 17. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara | 250.000 Orang | 250.000 Orang |
| 18. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara | 3.500.000 Orang | 3.500.000 Orang |
| 19. | Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 | 20 Unit | 20 Unit |
| 20. | Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit | 5 Unit | 5 Unit |
| 21. | Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit | 5 Unit | 5 Unit |
| 22. | Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit | - | - |
| 23. | Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang | 1.200 Orang | 1.453 Orang |
| 24. | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 | 77,00 Poin | 77,00 Poin |
| 5426 | Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional | | |
| | <i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional</i> | | |
| 1. | Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang disusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi | 10 Dokumen | 10 Dokumen |
| 2. | Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia | 10 unit | 10 unit |
| 3. | Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan <i>reliable</i> pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia | 50 Paket Data | 50 Paket Data |

| Kode | Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK | Target Tahun 2015 | Prognosis Capaian Tahun 2015 |
|------|---|-------------------|------------------------------|
| 4. | Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS | 20 PKS | 20 PKS |
| 5. | Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia | 10 Unit | 10 Unit |
| 6. | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan | 10 Dokumen | 10 Dokumen |
| 7. | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha | 10.000 Ha | 10.000 Ha |
| 8. | Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun | 50 Desa | 50 Desa |
| 9. | Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha | 10.000 Ha | 10.000 Ha |
| 10. | Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi |
| 11. | Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 | 2% | 2% |
| 12. | Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi | 7 Paket Data | 7 Paket Data |
| 13. | Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit. | 10 Unit | 10 Unit |
| 14. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara | 250.000 Orang | 250.000 Orang |
| 15. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara | 3.500.000 Orang | 3.500.000 Orang |
| 16. | Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 | 20 Unit | 20 Unit |
| 17. | Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit | 5 Unit | 5 Unit |
| 18. | Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit | 5 Unit | 5 Unit |
| 19. | Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit | - | - |
| 20. | Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+</i> pada 2 Unit KK | - | - |
| 21. | Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang | 1.200 Orang | 4.871 Orang |
| 22. | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 | 77,00 Poin | 77,00 Poin |

| Kode | Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK | Target Tahun 2015 | Prognosis Capaian Tahun 2015 |
|-------------|---|-------------------|------------------------------|
| 5419 | Kegiatan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE | | |
| | <i>Sasaran Kegiatan: Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE</i> | | |
| 1. | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin | 77,00 Poin | 77,00 Poin |



Banteng (*Bos javanicus*) di Taman Nasional Alas Purwo
Foto: S.Y. Chrystanto

Lahan pertanian dan pemukiman yang berdampingan dengan kawasan
Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung
Foto: Indra Pradana



Bab III

RENCANA KERJA TAHUN 2016

A. Rencana Kerja

Direktorat Jenderal KSDAE menjadi penanggung jawab pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Program ini melaksanakan rangkaian upaya yang merupakan penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem adalah (1) Peningkatan

efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; serta (2) peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati. Indikator kinerja program (IKP) dan tahapan pencapaian IKP dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2016 diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikator Kinerja Program dan Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2016

| No. | Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Tahun 2016 |
|-----|---|------------------------------|
| A. | <i>Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati</i> | |
| 1. | Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar) | 50 KK |
| 2. | Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit | 80 Unit |
| 3. | Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i>) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 | 2% |
| 4. | Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit | 13 Unit |
| 5. | Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) | 7 Paket Data |

| No. | Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Tahun 2016 |
|-----------|--|------------------------------|
| <i>B.</i> | <i>Peningkatan penerimaan devisa dan PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati</i> | |
| 1. | Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Triliun | Rp 5 T |
| 2. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara | 250.000 Orang |
| 3. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara | 4.000.000 Orang |
| 4. | Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan <i>Geothermal</i> sebanyak 5 Unit) | 26 Unit |

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan. Setiap kegiatan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja mandiri (pusat dan UPT di daerah) di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Masing-masing

kegiatan memiliki target capaian kinerja (indikator kinerja kegiatan), yang menggambarkan langkah atau tahapan pencapaian sasaran kegiatan.

Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target capaian kinerja kegiatan pada Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam adalah terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi,

serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam. Adapun indikator kinerja kegiatan (IKK), target kinerjanya dalam tahun 2016, serta tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4. IKK, Target Kinerja Kegiatan, serta Standar Komponen Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2016

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Tahun 2016 | Standar Komponen |
|-----|--|------------------------------|---|
| 1. | Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok | 30 Dokumen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penilaian dan Pengesahan Dokumen Zonasi dan/atau Blok ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 2. | Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 100 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Verifikasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Tahun 2016 | Standar Komponen |
|-----|--|---------------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 3. | Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 521 Paket Data | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Pembangunan Sistem IKA ▪ Operasional dan Pemeliharaan Sistem IKA ▪ Desiminasi Data dan Informasi ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 4. | Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK | 80 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penyusunan Indikatif Rancang Bangun KPHK ▪ Penilaian Rancang Bangun KPHK ▪ Penetapan KPHK ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 5. | Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS | 20 PKS | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Monitoring dan Evaluasi |

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Kawasan Konservasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan

pelestarian alam, dan taman buru. Adapun target kinerjanya dalam tahun 2016, serta tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. IKK, Target Kinerja Kegiatan, serta Standar Komponen Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2016

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Tahun 2016 | Standar Komponen |
|-----|---|---------------------------|---|
| 1. | Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 50 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penyusunan Baseline dan updating Data METT ▪ Verifikasi Hasil <i>Self Assesment</i> METT ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 2. | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan | 30 Dokumen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penilaian dan Pengesahan Dokumen Rencana Pengelolaan ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 3. | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha | 30.000 Ha | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Tahun 2016 | Standar Komponen |
|-----|---|---------------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas Permasalahan Kawasan Konservasi ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 4. | Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa | 77 Desa | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penetapan Daerah Penyangga ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 5. | Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha | 30.000 Ha | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Analisis Prakondisi dan Potensi Zona Tradisional ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Pengembangan Kemitraan ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 6. | Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK | 80 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 7. | Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi | 34 Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Pengembangan Sistem Deteksi dan Peringatan Dini Kebakaran Hutan Konservasi ▪ Deteksi dan Peringatan Dini Kebakaran Hutan Konservasi ▪ Monitoring dan Evaluasi |

Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik adalah terjaminnya

efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik. Adapun IKK, target kinerjanya dalam tahun 2016, serta tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6. IKK, Target Kinerja Kegiatan, serta Standar Komponen Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2016

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Tahun 2016 | Standar Komponen |
|-----|---|---------------------------|---|
| 1. | Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 | 2% | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi dan Peningkatan Populasi Spesies ▪ Perencanaan dan Evaluasi ▪ Pengelolaan Database Species Prioritas ▪ Pelaksanaan Konvensi Non CITES ▪ Monitoring dan Evaluasi |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Tahun 2016 | Standar Komponen |
|-----|--|---------------------------|---|
| 2. | Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013 | 2 Spesies | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 3. | Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit | 10 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Assesment Penangkaran ▪ Audit Penangkaran ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 4. | Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Trilyun | Rp 5 T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Pelaksanaan Konvensi CITES ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 5. | Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M | Rp 10 M | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 6. | Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi | 7 Paket Data | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Pembangunan dan Operasional Sistem Informasi Species ▪ Desiminasi Data dan Informasi ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 7. | Jumlah <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC | 2 PIC | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Assesment PIC ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 8. | Jumlah hasil <i>assesment</i> Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik | 4 PRG | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Assesment Aman Lingkungan PRG ▪ Operasional Komisi Keamanan Hayati PRG ▪ Pengembangan dan Operasional Balai Kliring Keamanan Hayati ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 9. | Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi | 1 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Operasional Balai Kliring ABS ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 10. | Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit | 10 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penyusunan <i>Blue Print</i> Pusat Pengembangbiakan dan Suaka Satwa (<i>sanctuary</i>) Spesies Terancam Punah ▪ Monitoring dan Evaluasi |

Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas

pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Adapun IKK, target kinerjanya dalam tahun 2016, serta tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7. IKK, Target Kinerja Kegiatan, serta Standar Komponen Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2016

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Tahun 2016 | Standar Komponen |
|-----|---|---------------------------|--|
| 1. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara | 250.000 Orang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Informasi, Promosi dan Pemasaran ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 2. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara | 4.000.000 Orang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Informasi, Promosi dan Pemasaran ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 3. | Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 | 20 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penilaian Pengusahaan Pariwisata Alam ▪ Penilaian dan Pengesahan Desain Tapak ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 4. | Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit | 5 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penilaian Pengusahaan Jasa Lingkungan Massa Air ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 5. | Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit | 10 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penilaian Pengusahaan Jasa Lingkungan Energi Air ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 6. | Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit | 1 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penilaian Pengusahaan Jasa Lingkungan Panas Bumi ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 7. | Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+</i> pada 2 Unit KK | - | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penilaian Calon Lokasi VCS/CCBA |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Tahun 2016 | Standar Komponen |
|-----|----------------------------|---------------------------|--|
| | | | REDD+ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Kerjasama Nasional dan Internasional ▪ Monitoring dan Evaluasi |

Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial adalah terselenggaranya pembentukan dan

pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial. Adapun IKK, target kerjanya dalam tahun 2016, serta tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial diuraikan sebagai berikut:

Tabel 8. IKK, Target Kinerja Kegiatan, serta Standar Komponen Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial Tahun 2016

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Tahun 2016 | Standar Komponen |
|-----|---|---------------------------|--|
| 1. | Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati) | 13 KEE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola KEE ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 2. | Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data | 13 Paket Data | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Fasilitasi Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi ▪ Pembangunan Sistem Informasi KEE ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 3. | Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen | 13 Dokumen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 4. | Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan | 2 Kawasan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penyusunan Rancangan Penataan Pengelolaan Kawasan Karst ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 5. | Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion | 1 Ekoregion | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penyusunan Rancangan Penataan Pengelolaan Kawasan Mangrove ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 6. | Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan | 60 Spesies | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Tahun 2016 | Standar Komponen |
|-----|--|---------------------------|--|
| | konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Fasilitasi Pengembangan Koleksi pada Taman Kehati ▪ Monitoring dan Evaluasi |

Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Balai Besar/Balai KSDA di seluruh Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta

pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan. Adapun IKK, target kinerjanya dalam tahun 2016, serta tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati diuraikan sebagai berikut:

Tabel 9. IKK, Target Kinerja Kegiatan, serta Standar Komponen Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Tahun 2016

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Tahun 2016 | Standar Komponen |
|-----|--|---------------------------|---|
| 1. | Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok | 30 Dokumen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat ▪ Penyusunan Rancangan Penataan Blok ▪ Konsultasi Publik Rancangan Penataan Blok ▪ Koordinasi Penilaian dan Pengesahan Rancangan Penataan Blok ▪ Penataan Batas Blok ▪ Koordinasi dan Konsultasi |
| 2. | Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 100 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi Potensi Kawasan ▪ Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi ▪ Koordinasi dan Konsultasi |
| 3. | Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 521 Paket Data | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kawasan ▪ Pengembangan Database Spatial dan Non Spatial ▪ Pengelolaan Data dan Informasi ▪ Desiminasi Data dan Informasi ▪ Koordinasi dan Konsultasi |
| 4. | Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK | 80 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Rancang Bangun KPHK ▪ Penyusunan RPHJP ▪ Penataan Wilayah Kerja KPHK ▪ Koordinasi dan Konsultasi |
| 5. | Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS | 20 PKS | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Pertimbangan Teknis ▪ Pengembangan Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Tahun 2016 | Standar Komponen |
|-----|---|---------------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konservasi ▪ Pengembangan Kerjasama Pembangunan Strategis ▪ Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerjasama ▪ Koordinasi dan Konsultasi |
| 6. | Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 50 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Self Assesment</i> METT ▪ Pemeliharaan Batas Kawasan Konservasi ▪ Identifikasi Kebutuhan Penelitian pada Kawasan Konservasi ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kawasan Konservasi ▪ Pengembangan Program Pendidikan Konservasi ▪ Pemberdayaan Masyarakat Tradisional ▪ Koordinasi dan Konsultasi |
| 7. | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan | 30 Dokumen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kawasan ▪ Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi ▪ Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi ▪ Koordinasi Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan ▪ Koordinasi dan Konsultasi |
| 8. | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha | 30.000 Ha | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisa Spasial Tutupan Vegetasi Kawasan Konservasi ▪ Kajian Pemulihan Ekosistem ▪ Perencanaan Rehabilitasi Kawasan Konservasi ▪ Rehabilitasi Kawasan Konservasi ▪ Restorasi Kawasan Konservasi ▪ Suksesi Alami ▪ Kajian Tipologi Permasalahan Kawasan Konservasi ▪ Penyelesaian Konflik Kawasan Konservasi (Non Litigasi) ▪ Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Non Prosedural (Non Litigasi) ▪ Koordinasi dan Konsultasi ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 9. | Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun | 77 Desa | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prakondisi Pemberdayaan Masyarakat ▪ Pembentukan dan Pembinaan Kelembagaan ▪ Pendampingan Pemberdayan Masyarakat ▪ Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif ▪ Peningkatan Kapasitas Masyarakat ▪ Sosialisasi Pemberdayaan |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Tahun 2016 | Standar Komponen |
|-----|---|---------------------------|---|
| | | | <p>Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Kemitraan/Kolaborasi ▪ Penetapan Daerah Penyangga ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 10. | Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK | 80 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi, Eksplorasi, Inventarisasi, dan Pemetaan Sebaran Potensi ▪ Pengelolaan Data dan Informasi ▪ Penyusunan Rencana Pengelolaan KPHK ▪ Operasional KPHK ▪ Pengembangan SDM KPHK ▪ Pengembangan Kapasitas Kelembagaan KPHK ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana KPHK ▪ Administrasi Kegiatan KPHK ▪ Koordinasi dan Konsultasi |
| 11. | Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi | 34 Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Patroli Pengamanan Hutan ▪ Koordinasi Pengamanan Hutan ▪ Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan ▪ Deteksi dan Peringatan Dini kebakaran hutan ▪ Koordinasi dan Konsultasi |
| 12. | Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 | 2% | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ▪ Monitoring Populasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ▪ Pembinaan Habitat Satwa Liar ▪ Pembinaan Populasi Satwa Liar ▪ Penanganan Konflik Satwa Liar dan Manusia ▪ Evakuasi Satwa Liar ▪ Operasional dan Pemeliharaan Satwa Liar ▪ Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa ▪ Operasional Pusat Latihan Gajah (PLG) ▪ Operasional <i>Conservation Response Unit</i> (CRU) ▪ Kampanye Pelestarian Satwa Liar dan Tumbuhan Alam ▪ Koordinasi dan Konsultasi |
| 13. | Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013 | 2 Spesies | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Teknis Lembaga Konservasi ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Evaluasi Lembaga Konservasi ▪ Pembinaan dan Koordinasi |
| 14. | Besaran PNBPN dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M | Rp 10 M | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Teknis Penyusunan Standar Harga Patokan ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Tahun 2016 | Standar Komponen |
|-----|---|---------------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring dan Evaluasi ▪ Koordinasi dan Konsultasi |
| 15. | Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi | 7 Paket Data | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ▪ Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ▪ Monitoring Populasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ▪ Photo Hunting Satwa Liar dan Tumbuhan Alam ▪ Penyusunan Database Spesies ▪ Desiminasi Data dan Informasi |
| 16. | Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit. | 10 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operasional dan Pemeliharaan Satwa Liar ▪ Evakuasi Satwa Liar ▪ Operasional Pusat Pengembangbiakan dan Suaka Satwa Liar ▪ Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pusat Pengembangbiakan dan Suaka Satwa Liar ▪ Koordinasi dan Konsultasi |
| 17. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara | 250.000 Orang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis Kebutuhan Pengembangan Pariwisata Alam ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata Alam ▪ Informasi, Promosi dan Pemasaran ▪ Operasional Pengelolaan Obyek Wisata Alam |
| 18. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara | 4.000.000 Orang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis Kebutuhan Pengembangan Pariwisata Alam ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata Alam ▪ Informasi, Promosi dan Pemasaran ▪ Operasional Pengelolaan Obyek Wisata Alam |
| 19. | Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 | 20 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Desain Tapak ▪ Informasi, Promosi dan Pemasaran Potensi Obyek Wisata Alam ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IUPSWA dan IUPJWA ▪ Evaluasi IUPSWA dan IUPJWA ▪ Fasilitas Forum Wisata Alam ▪ Pembinaan dan Koordinasi |
| 20. | Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit | 5 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi Potensi Sumberdaya Air ▪ Valuasi Ekonomi Sumberdaya Air |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Tahun 2016 | Standar Komponen |
|-----|---|---------------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Air ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IPA dan IUPA ▪ Evaluasi IPA dan IUPA ▪ Pembinaan dan Koordinasi IPA dan IUPA |
| 21. | Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit | 10 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi Potensi Sumberdaya Air ▪ Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Energi Air ▪ Demplot <i>Micro Hydro Electrical Power Plant</i> ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IPEA dan IUPEA ▪ Evaluasi IPEA dan IUPEA ▪ Pembinaan dan Koordinasi IPEA dan IUPEA |
| 22. | Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit | 1 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi Potensi Panas Bumi ▪ Koordinasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi ▪ Evaluasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi ▪ Pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi |
| 23. | Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang | 1.200 Orang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan Kader Konservasi ▪ Kemah Bakti Kader Konservasi ▪ Pembinaan KK/KPA/KSM/KP ▪ Pembinaan dan Koordinasi Aktivitas KK/KPA/KSM/KP ▪ Penilaian KK/KPA/KSM/KP dalam rangka Wana Lestari |
| 24. | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 | 77,25 Poin | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Program dan Anggaran ▪ Evaluasi dan Pelaporan ▪ Data dan Informasi ▪ Kerjasama dan Kemitraan ▪ Administrasi Kepegawaian ▪ Administrasi Keuangan ▪ Ketatausahaan dan Umum ▪ Administrasi Perlengkapan ▪ Peningkatan Kapasitas SDM ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana |

Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Balai Besar/Balai Taman Nasional di seluruh Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional adalah

terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional. Adapun IKK, target kinerjanya dalam tahun 2016, serta tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional diuraikan sebagai berikut:

Tabel 10. IKK, Target Kinerja Kegiatan, serta Standar Komponen Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional Tahun 2016

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Tahun 2016 | Standar Komponen |
|-----|---|---------------------------|--|
| 1. | Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi | 10 Dokumen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat ▪ Penyusunan Rancangan Zonasi ▪ Konsultasi Publik Rancangan Zonasi ▪ Koordinasi Penilaian dan Pengesahan Rancangan Zonasi ▪ Penataan Batas Zonasi ▪ Koordinasi dan Konsultasi |
| 2. | Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia | 10 unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi ▪ Koordinasi dan Konsultasi |
| 3. | Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan <i>reliable</i> pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia | 50 Paket Data | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kawasan ▪ Pengembangan Database Spatial dan Non Spatial ▪ Pengelolaan Data dan Informasi ▪ Desiminasi Data dan Informasi ▪ Koordinasi dan Konsultasi |
| 4. | Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS | 20 PKS | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi ▪ Pengembangan Kerjasama Pembangunan Strategis ▪ Evaluasi Perjanjian Kerjasama ▪ Koordinasi dan Konsultasi |
| 5. | Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia | 10 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Self Assesment</i> METT ▪ Pemeliharaan Batas Kawasan Konservasi ▪ Identifikasi Kebutuhan Penelitian pada Kawasan Konservasi ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kawasan Konservasi ▪ Pengembangan Program Pendidikan Konservasi ▪ Pemberdayaan Masyarakat Tradisional ▪ Koordinasi dan Konsultasi |
| 6. | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan | 10 Dokumen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kawasan ▪ Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi ▪ Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Tahun 2016 | Standar Komponen |
|-----|---|---------------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan ▪ Koordinasi dan Konsultasi |
| 7. | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha | 30.000 Ha | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisa Spasial Tutupan Vegetasi Kawasan Konservasi ▪ Kajian Pemulihan Ekosistem ▪ Perencanaan Rehabilitasi Kawasan Konservasi ▪ Rehabilitasi Kawasan Konservasi ▪ Restorasi Kawasan Konservasi ▪ Suksesi Alami ▪ Kajian Tipologi Permasalahan Kawasan Konservasi ▪ Penyelesaian Konflik Kawasan Konservasi (Non Litigasi) ▪ Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Non Prosedural (Non Litigasi) ▪ Koordinasi dan Konsultasi ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 8. | Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun | 50 Desa | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prakondisi Pemberdayaan Masyarakat ▪ Pembentukan dan Pembinaan Kelembagaan ▪ Pendampingan Pemberdayan Masyarakat ▪ Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif ▪ Peningkatan Kapasitas Masyarakat ▪ Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat ▪ Pengembangan Kemitraan/Kolaborasi ▪ Penetapan Daerah Penyangga ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 9. | Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha | 40.000 Ha | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prakondisi Zona Tradisional ▪ Sosialisasi Pengembangan Pemanfaatan Zona Tradisional ▪ Pengembangan Kemitraan/Kolaborasi ▪ Peningkatan Kapasitas Masyarakat ▪ Koordinasi dan Konsultasi ▪ Monitoring dan Evaluasi |
| 10. | Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi | 34 Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Patroli Pengamanan Hutan ▪ Koordinasi Pengamanan Hutan ▪ Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan ▪ Deteksi dan Peringatan Dini kebakaran hutan ▪ Koordinasi dan Konsultasi |
| 11. | Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 | 2% | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ▪ Monitoring Populasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ▪ Pembinaan Habitat Satwa Liar ▪ Pembinaan Populasi Satwa Liar |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Tahun 2016 | Standar Komponen |
|-----|---|---------------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanganan Konflik Satwa Liar dan Manusia ▪ Evakuasi Satwa Liar ▪ Operasional dan Pemeliharaan Satwa Liar ▪ Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa ▪ Operasional Pusat Latihan Gajah (PLG) ▪ Operasional <i>Conservation Response Unit</i> (CRU) ▪ Kampanye Pelestarian Satwa Liar dan Tumbuhan Alam ▪ Koordinasi dan Konsultasi |
| 12. | Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi | 7 Paket Data | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ▪ Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ▪ Monitoring Populasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ▪ Photo Hunting Satwa Liar dan Tumbuhan Alam ▪ Penyusunan Database Spesies ▪ Desiminasi Data dan Informasi |
| 13. | Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit. | 10 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operasional dan Pemeliharaan Satwa Liar ▪ Evakuasi Satwa Liar ▪ Operasional Pusat Pengembangbiakan dan Suaka Satwa Liar ▪ Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pusat Pengembangbiakan dan Suaka Satwa Liar ▪ Koordinasi dan Konsultasi |
| 14. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara | 250.000 Orang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis Kebutuhan Pengembangan Pariwisata Alam ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata Alam ▪ Informasi dan Promosi ▪ Operasional Pengelolaan Obyek Wisata Alam |
| 15. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara | 4.000.000 Orang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis Kebutuhan Pengembangan Pariwisata Alam ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata Alam ▪ Informasi dan Promosi ▪ Operasional Pengelolaan OWA |
| 16. | Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun | 20 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Desain Tapak ▪ Informasi dan Promosi Potensi Obyek Wisata Alam |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Tahun 2016 | Standar Komponen |
|-----|---|---------------------------|--|
| | 2013 | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IUPSWA dan IUPJWA ▪ Evaluasi IUPSWA dan IUPJWA ▪ Pembinaan dan Koordinasi |
| 17. | Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit | 5 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi Potensi SD Air ▪ Valuasi Ekonomi Sumberdaya Air ▪ Koordinasi Pemanfaatan SD Air ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IPA dan IUPA ▪ Evaluasi IPA dan IUPA ▪ Pembinaan dan Koordinasi IPA dan IUPA |
| 18. | Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit | 10 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi Potensi Sumberdaya Air ▪ Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Energi Air ▪ Demplot <i>Micro Hydro Electrical Power Plant</i> ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IPEA dan IUPEA ▪ Evaluasi IPEA dan IUPEA ▪ Pembinaan dan Koordinasi IPEA dan IUPEA |
| 19. | Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit | 1 Unit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi Potensi Panas Bumi ▪ Koordinasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi ▪ Evaluasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi ▪ Pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi |
| 20. | Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+</i> pada 2 Unit KK | - | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Valuasi Ekonomi SDA Karbon ▪ Penyusunan Dokumen Prasyarat registrasi atau sertifikasi VCS atau CCBA REDD+ |
| 21. | Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang | 1.200 Orang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan Kader Konservasi ▪ Kemah Bakti Kader Konservasi ▪ Pembinaan KK/KPA/KSM/KP ▪ Pembinaan dan Koordinasi Aktivitas KK/KPA/KSM/KP ▪ Penilaian KK/KPA/KSM/KP dalam rangka Wana Lestari |
| 22. | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 | 77,25 Poin | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Program dan Anggaran ▪ Evaluasi dan Pelaporan ▪ Data dan Informasi ▪ Kerjasama dan Kemitraan ▪ Administrasi Kepegawaian ▪ Administrasi Keuangan ▪ Ketatausahaan dan Umum ▪ Administrasi Perlengkapan ▪ Peningkatan Kapasitas SDM ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana |

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE adalah terwujudnya reformasi tata kelola

kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Adapun IKK, target kinerjanya dalam tahun 2016, serta tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE diuraikan sebagai berikut:

Tabel 11. IKK, Target Kinerja Kegiatan, serta Standar Komponen Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja Tahun 2016 | Standar Komponen |
|-----|---|---------------------------|--|
| 1. | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin | 77,25 Poin | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Program dan Anggaran ▪ Evaluasi dan Pelaporan ▪ Data dan Informasi ▪ Kerjasama dan Kemitraan ▪ Administrasi Kepegawaian ▪ Administrasi Jabatan Fungsional ▪ Peningkatan Kapasitas SDM ▪ Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan ▪ Administrasi Keuangan ▪ Ketatausahaan dan Umum ▪ Administrasi Perlengkapan ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana ▪ Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan ▪ Bantuan Penanganan Perkara |

B. Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran program, IKP maupun IKK yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian target kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap

capaian target kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

$$C = \frac{R}{T} 100\%$$

dimana,

C : Tingkat capaian target kinerja
R : Realisasi capaian target kinerja
T : Target kinerja

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan formula sebagai berikut:

$$C = \frac{T-(R-T)}{T} 100\%$$

dimana,

C : Tingkat capaian target kinerja
R : Realisasi capaian target kinerja
T : Target kinerja

Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu

sebesar 150% dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari Direktorat Jenderal KSDAE.

C. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2016, sebagaimana pagu indikatif tahun 2016, direncanakan sebesar Rp. 1.841.300.000.000,- (satu trilyun delapan ratus empat puluh satu milyar tiga ratus juta rupiah). Namun demikian, berdasarkan surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.312/Menlhk-Setjen/2015 sebagai tindaklanjut surat Menteri Keuangan nomor S-505/MK.02/2015 tentang Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2016, pagu anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016

berkurang menjadi Rp. 1.521.710.000.000,- (satu trilyun lima ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).

Alokasi pagu anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai gaji dan tunjangan, operasional perkantoran serta belanja non operasional perkantoran. Sumber pembiayaan dan jenis belanja Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2016 adalah sebagaimana diuraikan pada tabel 12. Uraian rencana pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal PHKA pada tahun 2015 adalah sebagaimana diuraikan pada lampiran.

Tabel 12. Sumber Pembiayaan dan Jenis Belanja Pagu Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016

| No. | Sumber Dana | Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah) | | | Jumlah |
|-----|--------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | Belanja Pegawai | Belanja Barang | | |
| | | | Operasional | Non Operasional | |
| 1. | Rupiah Murni | 770.408.471 | 152.591.529 | 375.000.000 | 1.298.000.000 |
| 2. | PNBP | - | - | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 3. | HLN | - | - | 23.710.000 | 23.710.000 |
| | TOTAL | 770.408.471 | 152.591.529 | 598.710.000 | 1.521.710.000 |

Bab IV

PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016 merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE tahun 2016 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Rencana kerja tahunan ini merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019, yang saat ini telah ditetapkan. Rencana kerja tahunan merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 bagi seluruh unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Namun demikian, apabila sekiranya dibutuhkan penyempurnaan sebagai akibat dari adanya penyesuaian-penyempurnaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 serta Rancangan APBN Tahun 2016, maka akan dilakukan penyempurnaan setelah adanya hasil pembahasan dengan lembaga legislatif.

Selain digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2016 bagi seluruh unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, rencana kerja tahunan ini juga selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016, beserta seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, baik di pusat maupun di daerah. Tentu saja dengan melakukan penyesuaian-penyempurnaan sehubungan dengan

kemungkinan akan adanya perubahan-perubahan prioritas dalam APBN Tahun 2016.

Perlu diperhatikan bahwa Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE. Visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, kegiatan beserta seluruh indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian kerjanya, perlu mendapat perhatian secara serius agar mandat yang diberikan oleh negara dan masyarakat dapat dicapai secara optimal.

Untuk diketahui bersama bahwa tantangan terbesar dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah mempertahankan keberadaan keanekaragaman hayati agar tidak punah, namun sekaligus dapat memberikan manfaatnya untuk kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi, dalam mendukung pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia. Tantangan tersebut harus dijawab oleh seluruh aparat di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE beserta mitra kerja dan CSOs dengan memberikan segala daya dan upayanya semaksimal mungkin, dalam rangka mendukung pencapaian cita-cita luhur Bangsa Indonesia.

Penanaman pohon oleh Direktur Jenderal KSDAE di Wates didampingi oleh Bupati Kulon Progo serta Asisten Perencanaan dan Pembangunan Provinsi DIY, dalam rangka Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional Tahun 2015



LAMPIRAN
RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2016

BIMBINGAN TEKNIS PEMANFAATAN TUMBUHAN & SATWA LIAR



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Tengah
Jakarta, 21 November 2015



ER 2015

Lampiran 1:

Formulir 1

**PENJELASAN UMUM
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA –K/L)
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Kementerian/Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Visi : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
3. Misi : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Target 2016 | Alokasi 2016 (ribu) |
|-----|--|---|-------------|---------------------|
| 1. | Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5 | | |
| 2. | Memfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan | Peningkatan kontribusi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup terhadap penerimaan devisa dan PNBPN sebagai masukan terhadap PDB nasional | | |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Target 2016 | Alokasi 2016 (ribu) |
|---------------|---|---|-------------|----------------------|
| 3. | Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan | Derajat keberfungsian ekosistem yang meningkat setiap tahun | | |
| Jumlah | | | | 7.242.384.690 |

5. Program dan Pendanaan

| Kode | Program | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Prakiraan Kebutuhan (juta) | | |
|---------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|----------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | Rupiah | PHLN+PDN | PNBP+BLU | SBSN | Jumlah | 2017 | 2018 | 2019 |
| 08 | Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | 1.562.409 | 23.710 | 248.181 | 0 | 1.834.300 | 1.944.356 | 2.061.017 | 2.184.678 |
| Jumlah | | 1.562.409 | 23.710 | 248.181 | 0 | 1.834.300 | 1.944.356 | 2.061.017 | 2.184.678 |

Lampiran 2:

Formulir 2

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA –K/L)
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Kementerian/Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sasaran Strategis : 1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat;
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
3. Program : Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
4. Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target 2016 | Alokasi 2016 (juta) |
|-----|---|--|--------------|---------------------|
| 1. | Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati | | | 1.834.300 |
| | | Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar) | 50 KK | |
| | | Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit | 80 Unit | |
| | | Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i>) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 | 2% | |
| | | Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit | 13 Unit | |
| | | Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman | 7 Paket Data | |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target 2016 | Alokasi 2016 (juta) |
|---------------|--|--|-----------------|---------------------|
| | | hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) | | |
| 2. | Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati | | | |
| | | Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Triliun | Rp 5 T | |
| | | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara | 250.000 Orang | |
| | | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara | 4.000.000 Orang | |
| | | Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan <i>Geothermal</i> sebanyak 5 Unit) | 26 Unit | |
| Jumlah | | | | 1.834.300 |

6. Kegiatan dan Pendanaan

| Kode | Kegiatan | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | Prakiraan Kebutuhan (juta) | | | |
|---------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Rupiah | PHLN+PDN | PNBP+BLU | SBSN | Jumlah | 2017 | 2018 | 2019 |
| 5419 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE | 33.190 | 0 | 8.329 | 0 | 41.519 | 44.010 | 46.650 | 49.449 |
| 5420 | Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam | 17.668 | 0 | 2.772 | 0 | 20.440 | 37.750 | 40.015 | 42.415 |
| 5421 | Pengelolaan Kawasan Konservasi | 13.442 | 19.200 | 2.971 | 0 | 35.613 | 21.667 | 22.967 | 24.345 |
| 5422 | Konservasi Spesies dan Genetik | 19.968 | 0 | 5.368 | 0 | 25.336 | 26.856 | 28.467 | 30.176 |
| 5423 | Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi | 16.786 | 0 | 3.543 | 0 | 20.329 | 21.548 | 22.841 | 24.211 |
| 5424 | Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial | 8.865 | 4.510 | 5.575 | 0 | 18.950 | 20.087 | 21.292 | 22.570 |
| 5425 | Konservasi Sumber Daya Alam Hayati | 726.448 | 0 | 97.671 | 0 | 824.119 | 873.565 | 925.980 | 981.538 |
| 5426 | Pengelolaan Taman Nasional | 726.042 | 0 | 121.952 | 0 | 847.994 | 898.873 | 952.805 | 1.009.974 |
| Jumlah | | 1.562.409 | 23.710 | 248.181 | 0 | 1.834.300 | 1.944.356 | 2.061.017 | 2.184.678 |

Lampiran 3.A:

Formulir 3

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA –K/L)
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Kementerian/Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Program : Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
3. Sasaran Program :
 1. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati;
 2. Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati;
4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
5. Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
6. Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaannya

| No. | Sasaran Kegiatan (Output) | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2016 | Alokasi 2016 (juta) | Dimensi | Bidang | Nawacita | Dukungan PPP/ARG/KSST/ MPI/PPBAN |
|---------------|--|--|-------------|---------------------|---------|--------|----------|----------------------------------|
| 01 | Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | | 77,25 | 41.519 | 02 | 12 | 07 | ---- |
| | | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 | 77,25 | | | | | |
| Jumlah | | | | 41.519 | | | | |

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin | 77,25 | 41.519 | 41.519 | 77,50 | 77,75 | 78,00 | 44.010 | 46.650 | 49.449 |
| | ▪ Penyusunan Program dan Anggaran | | | | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi dan Pelaporan | | | | | | | | | |
| | ▪ Data dan Informasi | | | | | | | | | |
| | ▪ Kerjasama dan Kemitraan | | | | | | | | | |
| | ▪ Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | |
| | ▪ Administrasi Jabatan Fungsional | | | | | | | | | |
| | ▪ Peningkatan Kapasitas SDM | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan | | | | | | | | | |
| | ▪ Administrasi Keuangan | | | | | | | | | |
| | ▪ Ketatausahaan dan Umum | | | | | | | | | |
| | ▪ Administrasi Perlengkapan | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana | | | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan | | | | | | | | | |
| | ▪ Bantuan Penanganan Perkara | | | | | | | | | |
| | Jumlah | 77,25 | 41.519 | 41.519 | 77,50 | 77,75 | 78,00 | 44.010 | 46.650 | 49.449 |

B. Sumber Pendanaan

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|--------------------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| 1. | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin | | 33.190 | 0 | 8.329 | 0 | 41.519 | Kota Jakarta Pusat |
| | ▪ Penyusunan Program dan Anggaran | BLK | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi dan Pelaporan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Data dan Informasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Kerjasama dan Kemitraan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Administrasi Kepegawaian | BLK | | | | | | |
| | ▪ Administrasi Jabatan Fungsional | BLK | | | | | | |
| | ▪ Peningkatan Kapasitas SDM | BLK | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|----------|---------------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| | ▪ Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Administrasi Keuangan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Ketatausahaan dan Umum | BLK | | | | | | |
| | ▪ Administrasi Perlengkapan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bantuan Penanganan Perkara | BLK | | | | | | |
| | Jumlah | | 33.190 | 0 | 8.329 | 0 | 41.519 | |

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

| No | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Sumber/Loan | Pinjaman/Hibah Luar Negri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri (PDN) (juta) | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-------------|---|------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|-------|---------------------------|
| | | | Jenis PHLN (P/H/KE) | Paq (Sesuai MoA) | Penyerapan | Tanggal Mulai | Tanggal Tutup | Rencana Penarikan | | Kebutuhan Dana Pendamping |
| | | | | | | | | PLN/PDN | HIBAH | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | | | | | | | | | |

Lampiran 3.B:

Formulir 3

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA –K/L)
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Kementerian/Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Program : Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
3. Sasaran Program : 1. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati;
2. Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati;
4. Kegiatan : Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
5. Unit Organisasi : Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
6. Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaannya

| No. | Sasaran Kegiatan (Output) | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2016 | Alokasi 2016 (juta) | Dimensi | Bidang | Nawacita | Dukungan PPP/ARG/KSST/ MPI/PPBAN |
|-----|---|--|----------------|---------------------|---------|--------|----------|----------------------------------|
| 01 | Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam | | | 20.440 | 02 | 12 | 07 | ---- |
| | | Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok | 30 Dokumen | | | | | |
| | | Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 100 Unit | | | | | |
| | | Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 521 Paket Data | | | | | |
| | | Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK | 80 Unit | | | | | |

| No. | Sasaran Kegiatan (Output) | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2016 | Alokasi 2016 (juta) | Dimensi | Bidang | Nawacita | Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN |
|---------------|---------------------------|--|-------------|---------------------|---------|--------|----------|---------------------------------|
| | | Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS | 20 PKS | | | | | |
| Jumlah | | | | 20.440 | | | | |

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | |
|-----|--|------------|--------------|-----------------------|----------------|------|------|-----------------------|--------|--------|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok | 30 | | 20.440 | 30 | 30 | 30 | 37.750 | 40.015 | 42.415 |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | |
| | ▪ Penilaian dan Pengesahan Dokumen Zonasi dan/atau Blok | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | |
| 2. | Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | |
| | ▪ Verifikasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | |
| 3. | Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 521 | | | 521 | 521 | 521 | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|--|------------|--------------|-----------------------|----------------|------|------|-----------------------|---------------|---------------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembangunan Sistem IKA | | | | | | | | | | |
| | ▪ Operasional dan Pemeliharaan Sistem IKA | | | | | | | | | | |
| | ▪ Desiminasi Data dan Informasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 4. | Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK | 80 | | | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Indikatif Rancang Bangun KPHK | | | | | | | | | | |
| | ▪ Penilaian Rancang Bangun KPHK | | | | | | | | | | |
| | ▪ Penetapan KPHK | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 5 | Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS | 20 | | | 20 | 20 | 20 | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| | Jumlah | | | 20.440 | | | | 37.750 | 40.015 | 42.415 | |

B. Sumber Pendanaan

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|--------------------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| 1. | Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok | | 17.668 | 0 | 2.772 | 0 | 20.440 | Kota Jakarta Pusat |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penilaian dan Pengesahan Dokumen Zonasi dan/atau Blok | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 2. | Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Verifikasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 3. | Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembangunan Sistem IKA | BLK | | | | | | |
| | ▪ Operasional dan Pemeliharaan Sistem IKA | BLK | | | | | | |
| | ▪ Desiminasi Data dan Informasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 4. | Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Indikatif Rancang Bangun KPHK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penilaian Rancang Bangun KPHK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penetapan KPHK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 5 | Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|----------|---------------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| | Jumlah | | 17.668 | 0 | 2.772 | 0 | 20.440 | |

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

| No | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Sumber/Loan | Pinjaman/Hibah Luar Negri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri (PDN) (juta) | | | | | | | Kebutuhan Dana Pendamping |
|----|--------------------------------------|-------------|---|-------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|-------|---------------------------|
| | | | Jenis PHLN (P/H/KE) | Pagu (Sesuai MoA) | Penyerapan | Tanggal Mulai | Tanggal Tutup | Rencana Penarikan | | |
| | | | | | | | | PLN/PDN | HIBAH | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | | | | | | | | | |

Lampiran 3.C:

Formulir 3

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA –K/L)
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Kementerian/Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Program : Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
3. Sasaran Program :
 1. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati;
 2. Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati;
4. Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi
5. Unit Organisasi : Direktorat Kawasan Konservasi
6. Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaannya

| No. | Sasaran Kegiatan (Output) | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2016 | Alokasi 2016 (juta) | Dimensi | Bidang | Nawacita | Dukungan PPP/ARG/KSST/ MPI/PPBAN |
|-----|--|---|-------------|---------------------|---------|--------|----------|----------------------------------|
| 01 | Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru | Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 50 Unit | 35.613 | 02 | 12 | 07 | ---- |
| | | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan | 30 Dokumen | | | | | |
| | | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha | 30.000 Ha | | | | | |
| | | Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa | 77 Desa | | | | | |
| | | Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha | 30.000 Ha | | | | | |
| | | Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non | 80 Unit | | | | | |

| No. | Sasaran Kegiatan (Output) | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2016 | Alokasi 2016 (juta) | Dimensi | Bidang | Nawacita | Dukungan PPP/ARG/KSST/ MPI/PPBAN |
|---------------|---------------------------|---|-------------|---------------------|---------|--------|----------|----------------------------------|
| | | taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK | | | | | | |
| | | Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | |
| Jumlah | | | | 35.613 | | | | |

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-----------------------|----------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 50 | | 35.613 | 50 | 50 | 50 | 37.750 | 40.015 | 42.415 |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Baseline dan updating Data METT | | | | | | | | | |
| | ▪ Verifikasi Hasil <i>Self Assesment</i> METT | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | |
| 2. | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan | 30 | | | 30 | 30 | 30 | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | |
| | ▪ Penilaian dan Pengesahan Dokumen Rencana Pengelolaan | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | |
| 3. | Luas kawasan konservasi terdegradasi | 30.000 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-----------------------|----------------|--------|--------|-----------------------|------|------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha | | | | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Fasilitasi Permasalahan Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 4. | Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa | 77 | | | 77 | 77 | 77 | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Penetapan Daerah Penyangga | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 5. | Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha | 30.000 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | | |
| | ▪ Analisis Prakondisi dan Potensi Zona Tradisional | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Kemitraan | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 6. | Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK | 80 | | | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 7. | Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi | 34 | | | 34 | 34 | 34 | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|--|------------|--------------|-----------------------|----------------|------|------|-----------------------|---------------|---------------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sistem Deteksi dan Peringatan Dini Kebakaran Hutan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Deteksi dan Peringatan Dini Kebakaran Hutan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| | Jumlah | | | 35.613 | | | | 37.750 | 40.015 | 42.415 | |

B. Sumber Pendanaan

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|--------------------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| 1. | Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | | 13.442 | 19.200 | 2.971 | 0 | 35.613 | Kota Jakarta Pusat |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Baseline dan updating Data METT | BLK | | | | | | |
| | ▪ Verifikasi Hasil <i>Self Assesment</i> METT | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 2. | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penilaian dan Pengesahan Dokumen Rencana Pengelolaan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| 3. | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Fasilitasi Permasalahan Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 4. | Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penetapan Daerah Penyangga | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 5. | Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Analisis Prakondisi dan Potensi Zona Tradisional | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Kemitraan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 6. | Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 7. | Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------|---------------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sistem Deteksi dan Peringatan Dini Kebakaran Hutan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Deteksi dan Peringatan Dini Kebakaran Hutan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| | Jumlah | | 13.442 | 19.200 | 2.971 | 0 | 35.613 | |

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

| No | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Sumber/Loan | Pinjaman/Hibah Luar Negri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri (PDN) (juta) | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|-------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| | | | Jenis PHLN (P/H/KE) | Pagu (Sesuai MoA) | Penyerapan | Tanggal Mulai | Tanggal Tutup | Rencana Penarikan | | Kebutuhan Dana Pendamping |
| | | | | | | | | PLN/PDN | HIBAH | |
| 1. | Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa | KfW Jerman | H | - | - | - | - | - | 19.200 | - |
| | Jumlah | | | | | | | | 19.200 | |

Lampiran 3.D:

Formulir 3

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA –K/L)
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Kementerian/Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Program : Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
3. Sasaran Program :
 1. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati;
 2. Peningkatan penerimaan devisa dan PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati;
4. Kegiatan : Konservasi Spesies dan Genetik
5. Unit Organisasi : Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati
6. Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaannya

| No. | Sasaran Kegiatan (Output) | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2016 | Alokasi 2016 (juta) | Dimensi | Bidang | Nawacita | Dukungan PPP/ARG/KSST/ MPI/PPBAN |
|-----|---|---|-------------|---------------------|---------|--------|----------|----------------------------------|
| 01 | Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik | Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 | 2% | 25.336 | 02 | 12 | 07 | ---- |
| | | Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013 | 2 Spesies | | | | | |
| | | Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit | 10 Unit | | | | | |
| | | Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Trilyun | Rp 5 T | | | | | |
| | | Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M | Rp 10 M | | | | | |
| | | Jumlah ketersediaan data dan informasi | 7 Paket | | | | | |

| No. | Sasaran Kegiatan (Output) | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2016 | Alokasi 2016 (juta) | Dimensi | Bidang | Nawacita | Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN |
|---------------|---------------------------|--|-------------|---------------------|---------|--------|----------|---------------------------------|
| | | sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi | Data | | | | | |
| | | Jumlah <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC | 2 PIC | | | | | |
| | | Jumlah hasil <i>assessment</i> Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik | 4 PRG | | | | | |
| | | Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi | 1 Unit | | | | | |
| | | Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit | 10 Unit | | | | | |
| Jumlah | | | | 25.336 | | | | |

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-----------------------|----------------|------|------|-----------------------|--------|--------|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 | 2 | | 25.336 | 2 | 2 | 2 | 26.856 | 28.467 | 30.176 |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi dan Peningkatan Populasi Spesies | | | | | | | | | |
| | ▪ Perencanaan dan Evaluasi | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengelolaan Database Species Prioritas | | | | | | | | | |
| | ▪ Pelaksanaan Konvensi Non CITES | | | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|--|------------|--------------|-----------------------|----------------|------|------|-----------------------|------|------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 2. | Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 3. | Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit | 10 | | | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Assesment Penangkaran ▪ Audit Penangkaran ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 4. | Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Trilyun | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Pelaksanaan Konvensi CITES ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 5. | Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M | 10 | | | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 6. | Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi | 7 | | | 7 | 7 | 7 | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|--|------------|--------------|-----------------------|----------------|------|------|-----------------------|------|------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembangunan dan Operasional Sistem Informasi Species | | | | | | | | | | |
| | ▪ Desiminasi Data dan Informasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 7. | Jumlah <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Assesment PIC | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 8. | Jumlah hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Assesment Aman Lingkungan PRG | | | | | | | | | | |
| | ▪ Operasional Komisi Keamanan Hayati PRG | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan dan Operasional Balai Kliring Keamanan Hayati | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 9. | Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Operasional Balai Kliring ABS | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 10. | Jumlah pusat pengembangbiakan | 10 | | | 10 | 10 | 10 | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-----------------------|----------------|------|------|-----------------------|---------------|---------------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit | | | | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan <i>Blue Print</i> Pusat Pengembangbiakan dan Suaka Satwa (<i>sanctuary</i>) Spesies Terancam Punah | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| | Jumlah | | | 25.336 | | | | 26.856 | 28.467 | 30.176 | |

B. Sumber Pendanaan

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|--------------------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| 1. | Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 | | 19.968 | 0 | 5.368 | 0 | 25.336 | Kota Jakarta Pusat |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi dan Peningkatan Populasi Spesies | BLK | | | | | | |
| | ▪ Perencanaan dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengelolaan Database Spesies Prioritas | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pelaksanaan Konvensi Non CITES | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 2. | Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013 | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 3. | Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Assesment Penangkaran | BLK | | | | | | |
| | ▪ Audit Penangkaran | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 4. | Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Trilyun | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pelaksanaan Konvensi CITES | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 5. | Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 6. | Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembangunan dan Operasional Sistem Informasi Species | BLK | | | | | | |
| | ▪ Desiminasi Data dan Informasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 7. | Jumlah <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|----------|---------------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Assesment PIC | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 8. | Jumlah hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Assesment Aman Lingkungan PRG | | | | | | | |
| | ▪ Operasional Komisi Keamanan Hayati PRG | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan dan Operasional Balai Kliring Keamanan Hayati | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 9. | Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Operasional Balai Kliring ABS | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 10. | Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan <i>Blue Print</i> Pusat Pengembangbiakan dan Suaka Satwa (<i>sanctuary</i>) Spesies Terancam Punah | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| | Jumlah | | 19.968 | 0 | 5.368 | 0 | 25.336 | |

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

| No | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Sumber/Loan | Pinjaman/Hibah Luar Negri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri (PDN) (juta) | | | | | | | Kebutuhan Dana Pendamping |
|----|---|-------------|---|----------------------|------------|------------------|------------------|-------------------|-------|---------------------------------|
| | | | Jenis PHLN (P/H/KE) | Pagu (Sesuai MoA) | Penyerapan | Tanggal Mulai | Tanggal Tutup | Rencana Penarikan | | |
| | | | | | | | | PLN/PDN | HIBAH | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | | | | | | | | - | |

Lampiran 3.E:

Formulir 3

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA –K/L)
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Kementerian/Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Program : Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
3. Sasaran Program :
 1. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati;
 2. Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati;
4. Kegiatan : Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
5. Unit Organisasi : Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
6. Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaannya

| No. | Sasaran Kegiatan (Output) | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2016 | Alokasi 2016 (juta) | Dimensi | Bidang | Nawacita | Dukungan PPP/ARG/KSST/ MPI/PPBAN |
|-----|--|--|-----------------|---------------------|---------|--------|----------|----------------------------------|
| 01 | Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara | 250.000 Orang | 20.329 | 02 | 12 | 07 | ---- |
| | | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara | 4.000.000 Orang | | | | | |
| | | Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 | 20 Unit | | | | | |
| | | Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit | 5 Unit | | | | | |
| | | Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit | 10 Unit | | | | | |
| | | Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di | 1 Unit | | | | | |

| No. | Sasaran Kegiatan (Output) | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2016 | Alokasi 2016 (juta) | Dimensi | Bidang | Nawacita | Dukungan PPP/ARG/KSST/ MPI/PPBAN |
|---------------|---------------------------|---|-------------|---------------------|---------|--------|----------|----------------------------------|
| | | kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit | | | | | | |
| | | Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard</i> (VCS) atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance</i> (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK | - | | | | | |
| Jumlah | | | | 20.329 | | | | |

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | |
|-----|--|------------|--------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------|--------|--------|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara | 250.000 | | 20.329 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 21.548 | 22.841 | 24.211 |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | |
| | ▪ Informasi, Promosi dan Pemasaran | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | |
| 2. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara | 4.000.000 | | | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | |
| | ▪ Informasi, Promosi dan Pemasaran | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | |
| 3. | Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 | 20 | | | 20 | 20 | 20 | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-----------------------|----------------|------|------|-----------------------|------|------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian Pengusahaan Pariwisata Alam | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian dan Pengesahan Desain Tapak | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 4. | Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian Pengusahaan Jasa Lingkungan Massa Air | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 5. | Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit | 10 | | | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian Pengusahaan Jasa Lingkungan Energi Air | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 6. | Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian Pengusahaan Jasa Lingkungan Panas Bumi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 7. | Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+</i> pada 2 Unit KK | - | | | 1 | 1 | - | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-----------------------|----------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Penilaian Calon Lokasi VCS/CCBA REDD+ | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Kerjasama Nasional dan Internasional | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| | Jumlah | | | 20.329 | 2 | 2 | 2 | 21.548 | 22.841 | 24.211 | |

B. Sumber Pendanaan

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|------------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| 1. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara | | 16.786 | 0 | 3.543 | 0 | 20.329 | Kota Bogor |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Informasi, Promosi dan Pemasaran | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 2. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Informasi, Promosi dan Pemasaran | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 3. | Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| | ▪ Penilaian Pengusahaan Pariwisata Alam | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penilaian dan Pengesahan Desain Tapak | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 4. | Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penilaian Pengusahaan Jasa Lingkungan Massa Air | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 5. | Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penilaian Pengusahaan Jasa Lingkungan Energi Air | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 6. | Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penilaian Pengusahaan Jasa Lingkungan Panas Bumi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 7. | Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+</i> pada 2 Unit KK | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|----------|---------------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| | ▪ Penilaian Calon Lokasi VCS/CCBA REDD+ | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Kerjasama Nasional dan Internasional | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| | Jumlah | | 19.968 | 0 | 5.368 | 0 | 25.336 | |

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

| No | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Sumber/Loan | Pinjaman/Hibah Luar Negri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri (PDN) (juta) | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-------------|---|-------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|-------|---------------------------|
| | | | Jenis PHLN (P/H/KE) | Pagu (Sesuai MoA) | Penyerapan | Tanggal Mulai | Tanggal Tutup | Rencana Penarikan | | Kebutuhan Dana Pendamping |
| | | | | | | | | PLN/PDN | HIBAH | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | | | | | | | | | |

Lampiran 3.F:

Formulir 3

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA –K/L)
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Kementerian/Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Program : Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
3. Sasaran Program :
 1. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati;
 2. Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati;
4. Kegiatan : Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial
5. Unit Organisasi : Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
6. Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaannya

| No. | Sasaran Kegiatan (Output) | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2016 | Alokasi 2016 (juta) | Dimensi | Bidang | Nawacita | Dukungan PPP/ARG/KSST/ MPI/PPBAN |
|-----|---|---|---------------|---------------------|---------|--------|----------|----------------------------------|
| 01 | Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial | Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati) | 13 KEE | 18.950 | 02 | 12 | 07 | ---- |
| | | Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data | 13 Paket Data | | | | | |
| | | Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen | 13 Dokumen | | | | | |
| | | Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan | 2 Kawasan | | | | | |
| | | Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion | 1 Ekoregion | | | | | |
| | | Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ | 60 Spesies | | | | | |

| No. | Sasaran Kegiatan (Output) | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2016 | Alokasi 2016 (juta) | Dimensi | Bidang | Nawacita | Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN |
|---------------|---------------------------|---|-------------|---------------------|---------|--------|----------|---------------------------------|
| | | langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies | | | | | | |
| Jumlah | | | | 18.950 | | | | |

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-----------------------|----------------|------|------|-----------------------|--------|--------|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati) | 13 | | 18.950 | 13 | 13 | 13 | 20.087 | 21.292 | 22.570 |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | |
| | ▪ Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola KEE | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | |
| 2. | Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data | 13 | | | 13 | 13 | 13 | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | |
| | ▪ Fasilitasi Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembangunan Sistem Informasi KEE | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | |
| 3. | Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen | 13 | | | 13 | 13 | 13 | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|--|------------|--------------|-----------------------|----------------|------|------|-----------------------|---------------|---------------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 4. | Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Rancangan Penataan Pengelolaan Kawasan Karst | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 5. | Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Rancangan Penataan Pengelolaan Kawasan Mangrove | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 6. | Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies | 60 | | | 60 | 60 | 60 | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Fasilitasi Pengembangan Koleksi pada Taman Kehati | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| | Jumlah | | | 18.950 | | | | 20.087 | 21.292 | 22.570 | |

B. Sumber Pendanaan

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|--------------------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| 1. | Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati) | | 8.865 | 4.510 | 5.575 | 0 | 18.950 | Kota Jakarta Pusat |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola KEE | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 2. | Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Fasilitasi Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembangunan Sistem Informasi KEE | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 3. | Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 4. | Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolannya pada 6 Kawasan | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Rancangan Penataan Pengelolaan Kawasan Karst | BLK | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 5. | Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Rancangan Penataan Pengelolaan Kawasan Mangrove | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 6. | Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan NSPK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Fasilitasi Pengembangan Koleksi pada Taman Kehati | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| | Jumlah | | 8.865 | 4.510 | 5.575 | 0 | 18.950 | |

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

| No | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Sumber/Loan | Pinjaman/Hibah Luar Negri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri (PDN) (juta) | | | | | | | |
|----|--|-------------|---|-------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| | | | Jenis PHLN (P/H/KE) | Pagu (Sesuai MoA) | Penyerapan | Tanggal Mulai | Tanggal Tutup | Rencana Penarikan | | Kebutuhan Dana Pendamping |
| | | | | | | | | PLN/PDN | HIBAH | |
| 1. | Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen | World Bank | H | - | - | - | - | - | 4.510 | - |
| | Jumlah | | | | | | | | 4.510 | |

Lampiran 3.G:

Formulir 3

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA –K/L)
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Kementerian/Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Program : Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
3. Sasaran Program :
 1. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati;
 2. Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati;
4. Kegiatan : Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
5. Unit Organisasi : Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam
6. Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaannya

| No. | Sasaran Kegiatan (Output) | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2016 | Alokasi 2016 (juta) | Dimensi | Bidang | Nawacita | Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN |
|-----|---|--|----------------|---------------------|---------|--------|----------|---------------------------------|
| 01 | Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan | Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok | 30 Dokumen | 824.119 | 02 | 12 | 07 | ---- |
| | | Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 100 Unit | | | | | |
| | | Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 521 Paket Data | | | | | |
| | | Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK | 80 Unit | | | | | |
| | | Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS | 20 PKS | | | | | |

| No. | Sasaran Kegiatan (Output) | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2016 | Alokasi 2016 (juta) | Dimensi | Bidang | Nawacita | Dukungan PPP/ARG/KSST/ MPI/PPBAN |
|-----|---------------------------|---|---------------|---------------------|---------|--------|----------|----------------------------------|
| | | Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 50 Unit | | | | | |
| | | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan | 30 Dokumen | | | | | |
| | | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha | 30.000 Ha | | | | | |
| | | Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun | 77 Desa | | | | | |
| | | Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK | 80 Unit | | | | | |
| | | Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | |
| | | Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 | 2% | | | | | |
| | | Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013 | 2 Spesies | | | | | |
| | | Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M | Rp 10 M | | | | | |
| | | Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi | 7 Paket Data | | | | | |
| | | Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit. | 10 Unit | | | | | |
| | | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang | 250.000 Orang | | | | | |

| No. | Sasaran Kegiatan (Output) | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2016 | Alokasi 2016 (juta) | Dimensi | Bidang | Nawacita | Dukungan PPP/ARG/KSST/ MPI/PPBAN |
|---------------|---------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|--------|----------|----------------------------------|
| | | wisatawan mancanegara | | | | | | |
| | | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara | 4.000.000 Orang | | | | | |
| | | Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 | 20 Unit | | | | | |
| | | Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit | 5 Unit | | | | | |
| | | Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit | 10 Unit | | | | | |
| | | Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit | 1 Unit | | | | | |
| | | Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang | 1.200 Orang | | | | | |
| | | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 | 77,25 Poin | | | | | |
| Jumlah | | | | 824.119 | | | | |

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | |
|-----|--|------------|--------------|-----------------------|----------------|------|------|-----------------------|---------|---------|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok | 30 | | 824.119 | 30 | 30 | 30 | 873.565 | 925.980 | 981.538 |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan | | | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|--|------------|--------------|-----------------------|----------------|------|------|-----------------------|------|------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Rancangan Penataan Blok | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsultasi Publik Rancangan Penataan Blok | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi Penilaian dan Pengesahan Rancangan Penataan Blok | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan Batas Blok | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | |
| 2. | Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi Potensi Kawasan | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | |
| 3. | Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 521 | | | 521 | 521 | 521 | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kawasan | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Database Spatial dan Non Spatial | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan Data dan Informasi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desiminasi Data dan Informasi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | |
| 4. | Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK | 80 | | | - | - | - | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Rancang Bangun KPHK | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan RPHJP | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan Wilayah Kerja KPHK | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | |
| 5. | Jumlah kerjasama pembangunan | 20 | | | 20 | 20 | 20 | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-----------------------|----------------|------|------|-----------------------|------|------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS | | | | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Pertimbangan Teknis | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Kerjasama Pembangunan Strategis | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerjasama | | | | | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | |
| 6. | Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | 50 | | | 50 | 50 | 50 | | | | |
| | ▪ <i>Self Assesment</i> METT | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pemeliharaan Batas Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Identifikasi Kebutuhan Penelitian pada Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Program Pendidikan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pemberdayaan Masyarakat Tradisional | | | | | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | |
| 7. | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan | 30 | | | 30 | 30 | 30 | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan | | | | | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kawasan | | | | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Konsultasi Publik Rencana | | | | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|--|------------|--------------|-----------------------|----------------|--------|--------|-----------------------|------|------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Pengelolaan Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan | | | | | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | |
| 8. | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya ekosistemnya seluas 100.000 Ha | 30.000 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| | ▪ Analisa Spasial Tutupan Vegetasi Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Kajian Pemulihan Ekosistem | | | | | | | | | | |
| | ▪ Perencanaan Rehabilitasi Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Rehabilitasi Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Restorasi Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Suksesi Alami | | | | | | | | | | |
| | ▪ Kajian Tipologi Permasalahan Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Penyelesaian Konflik Kawasan Konservasi (Non Litigasi) | | | | | | | | | | |
| | ▪ Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Non Prosedural (Non Litigasi) | | | | | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 9. | Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun | 77 | | | 77 | 77 | 77 | | | | |
| | ▪ Prakondisi Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembentukan dan Pembinaan Kelembagaan | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif | | | | | | | | | | |
| | ▪ Peningkatan Kapasitas Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | ▪ Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Kemitraan/Kolaborasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Penetapan Daerah Penyangga | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-----------------------|----------------|------|------|-----------------------|------|------|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 10. | Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK | 80 | | | 100 | 100 | 100 | | | |
| | ▪ Identifikasi, Eksplorasi, Inventarisasi, dan Pemetaan Sebaran Potensi | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengelolaan Data dan Informasi | | | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Rencana Pengelolaan KPHK | | | | | | | | | |
| | ▪ Operasional KPHK | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan SDM KPHK | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Kapasitas Kelembagaan KPHK | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana KPHK | | | | | | | | | |
| | ▪ Administrasi Kegiatan KPHK | | | | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | |
| 11. | Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi | 34 | | | 34 | 34 | 34 | | | |
| | ▪ Patroli Pengamanan Hutan | | | | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi Pengamanan Hutan | | | | | | | | | |
| | ▪ Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan | | | | | | | | | |
| | ▪ Deteksi dan Peringatan Dini kebakaran hutan | | | | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | |
| 12. | Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | | |
| | ▪ Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran Tumbuhan Alam dan Satwa Liar | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring Populasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan Habitat Satwa Liar | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan Populasi Satwa Liar | | | | | | | | | |
| | ▪ Penanganan Konflik Satwa Liar dan Manusia | | | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-----------------------|----------------|------|------|-----------------------|------|------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | ▪ Evakuasi Satwa Liar | | | | | | | | | | |
| | ▪ Operasional dan Pemeliharaan Satwa Liar | | | | | | | | | | |
| | ▪ Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa | | | | | | | | | | |
| | ▪ Operasional Pusat Latihan Gajah (PLG) | | | | | | | | | | |
| | ▪ Operasional <i>Conservation Response Unit</i> (CRU) | | | | | | | | | | |
| | ▪ Kampanye Pelestarian Satwa Liar dan Tumbuhan Alam | | | | | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | |
| 13. | Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | ▪ Pertimbangan Teknis Lembaga Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi Lembaga Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| 14. | Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M | 10 | | | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | ▪ Pertimbangan Teknis Penyusunan Standar Harga Patokan | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | |
| 15. | Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi | 7 | | | 7 | 7 | 7 | | | | |
| | ▪ Identifikasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar | | | | | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran Tumbuhan Alam dan Satwa Liar | | | | | | | | | | |
| | ▪ Monitoring Populasi Tumbuhan Alam | | | | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | dan Satwa Liar | | | | | | | | | | |
| | ▪ Photo Hunting Satwa Liar dan Tumbuhan Alam | | | | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Database Spesies | | | | | | | | | | |
| | ▪ Desiminasi Data dan Informasi | | | | | | | | | | |
| 16. | Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit. | 10 | | | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | ▪ Operasional dan Pemeliharaan Satwa Liar | | | | | | | | | | |
| | ▪ Evakuasi Satwa Liar | | | | | | | | | | |
| | ▪ Operasional Pusat Pengembangbiakan dan Suaka Satwa Liar | | | | | | | | | | |
| | ▪ Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pusat Pengembangbiakan dan Suaka Satwa Liar | | | | | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | |
| 17. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara | 250.000 | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | | | |
| | ▪ Analisis Kebutuhan Pengembangan Pariwisata Alam | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata Alam | | | | | | | | | | |
| | ▪ Informasi, Promosi dan Pemasaran | | | | | | | | | | |
| | ▪ Operasional Pengelolaan Obyek Wisata Alam | | | | | | | | | | |
| 18. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara | 4.000.000 | | | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | | | | |
| | ▪ Analisis Kebutuhan Pengembangan Pariwisata Alam | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata Alam | | | | | | | | | | |
| | ▪ Informasi, Promosi dan Pemasaran | | | | | | | | | | |
| | ▪ Operasional Pengelolaan Obyek | | | | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|--|------------|--------------|-----------------------|----------------|------|------|-----------------------|------|------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Wisata Alam | | | | | | | | | | |
| 19. | Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 | 20 | | | 20 | 20 | 20 | | | | |
| | ▪ Penyusunan Desain Tapak | | | | | | | | | | |
| | ▪ Informasi, Promosi dan Pemasaran Potensi Obyek Wisata Alam | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IUPSWA dan IUPJWA | | | | | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi IUPSWA dan IUPJWA | | | | | | | | | | |
| | ▪ Fasilitasi Forum Wisata Alam | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| 20. | Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Sumberdaya Air | | | | | | | | | | |
| | ▪ Valuasi Ekonomi Sumberdaya Air | | | | | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Air | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IPA dan IUPA | | | | | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi IPA dan IUPA | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi IPA dan IUPA | | | | | | | | | | |
| 21. | Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit | 10 | | | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Sumberdaya Air | | | | | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Energi Air | | | | | | | | | | |
| | ▪ Demplot <i>Micro Hydro Electrical Power Plant</i> | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IPEA dan IUPEA | | | | | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi IPEA dan IUPEA | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi IPEA dan | | | | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-----------------------|----------------|----------------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | IUPEA | | | | | | | | | | |
| 22. | Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Panas Bumi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi Pemanfaatan Potensi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| 23. | Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang | 1.200 | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | | | |
| | ▪ Pembentukan Kader Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Kemah Bakti Kader Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan KK/KPA/KSM/KP | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi Aktivitas KK/KPA/KSM/KP | | | | | | | | | | |
| | ▪ Penilaian KK/KPA/KSM/KP dalam rangka Wana Lestari | | | | | | | | | | |
| 24. | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 | 77,25 Poin | | | 77,50 | 77,75 | 78,00 | | | | |
| | ▪ Penyusunan Program dan Anggaran | | | | | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi dan Pelaporan | | | | | | | | | | |
| | ▪ Data dan Informasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Kerjasama dan Kemitraan | | | | | | | | | | |
| | ▪ Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | |
| | ▪ Administrasi Keuangan | | | | | | | | | | |
| | ▪ Ketatausahaan dan Umum | | | | | | | | | | |
| | ▪ Administrasi Perlengkapan | | | | | | | | | | |
| | ▪ Peningkatan Kapasitas SDM | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana | | | | | | | | | | |
| | Jumlah | | | 824.119 | | | | 873.565 | 925.980 | 981.538 | |

B. Sumber Pendanaan

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|---------|-------------------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| 1. | Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok | | 726.448 | 0 | 97.671 | 0 | 824.119 | Seluruh Indonesia |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Rancangan Penataan Blok | BLK | | | | | | |
| | ▪ Konsultasi Publik Rancangan Penataan Blok | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi Penilaian dan Pengesahan Rancangan Penataan Blok | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penataan Batas Blok | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| 2. | Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Kawasan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| 3. | Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kawasan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Database Spatial dan Non Spatial | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengelolaan Data dan Informasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Desiminasi Data dan Informasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| 4. | Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Rancang Bangun KPHK | BLK | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| | ▪ Penyusunan RPHJP | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penataan Wilayah Kerja KPHK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| 5. | Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Pertimbangan Teknis | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Kerjasama Pembangunan Strategis | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerjasama | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| 6. | Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia | | | | | | | |
| | ▪ <i>Self Assesment</i> METT | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pemeliharaan Batas Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Identifikasi Kebutuhan Penelitian pada Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Program Pendidikan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pemberdayaan Masyarakat Tradisional | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| 7. | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan | | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kawasan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| | ▪ Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| 8. | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha | | | | | | | |
| | ▪ Analisa Spasial Tutupan Vegetasi Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Kajian Pemulihan Ekosistem | BLK | | | | | | |
| | ▪ Perencanaan Rehabilitasi Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Rehabilitasi Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Restorasi Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Suksesi Alami | BLK | | | | | | |
| | ▪ Kajian Tipologi Permasalahan Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penyelesaian Konflik Kawasan Konservasi (Non Litigasi) | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Non Prosedural (Non Litigasi) | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 9. | Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun | | | | | | | |
| | ▪ Prakondisi Pemberdayaan Masyarakat | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembentukan dan Pembinaan Kelembagaan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif | BLK | | | | | | |
| | ▪ Peningkatan Kapasitas Masyarakat | BLK | | | | | | |
| | ▪ Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Kemitraan/Kolaborasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penetapan Daerah Penyangga | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 10. | Jumlah KPHK pada kawasan konservasi | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| | non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK | | | | | | | |
| | ▪ Identifikasi, Eksplorasi, Inventarisasi, dan Pemetaan Sebaran Potensi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengelolaan Data dan Informasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Rencana Pengelolaan KPHK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Operasional KPHK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan SDM KPHK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Kapasitas Kelembagaan KPHK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana KPHK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Administrasi Kegiatan KPHK | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| 11. | Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi | | | | | | | |
| | ▪ Patroli Pengamanan Hutan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi Pengamanan Hutan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Deteksi dan Peringatan Dini kebakaran hutan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| 12. | Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 | | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran Tumbuhan Alam dan Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring Populasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan Habitat Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan Populasi Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penanganan Konflik Satwa Liar dan Manusia | BLK | | | | | | |
| | ▪ Evakuasi Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Operasional dan Pemeliharaan Satwa Liar | BLK | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| | ▪ Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa | BLK | | | | | | |
| | ▪ Operasional Pusat Latihan Gajah (PLG) | BLK | | | | | | |
| | ▪ Operasional <i>Conservation Response Unit</i> (CRU) | BLK | | | | | | |
| | ▪ Kampanye Pelestarian Satwa Liar dan Tumbuhan Alam | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| 13. | Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013 | | | | | | | |
| | ▪ Pertimbangan Teknis Lembaga Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi Lembaga Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| 14. | Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M | | | | | | | |
| | ▪ Pertimbangan Teknis Penyusunan Standar Harga Patokan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| 15. | Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi | | | | | | | |
| | ▪ Identifikasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran Tumbuhan Alam dan Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring Populasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Photo Hunting Satwa Liar dan Tumbuhan Alam | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Database Spesies | BLK | | | | | | |
| | ▪ Desiminasi Data dan Informasi | BLK | | | | | | |
| 16. | Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| | suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit. | | | | | | | |
| | ▪ Operasional dan Pemeliharaan Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Evakuasi Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Operasional Pusat Pengembangbiakan dan Suaka Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pusat Pengembangbiakan dan Suaka Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| 17. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara | | | | | | | |
| | ▪ Analisis Kebutuhan Pengembangan Pariwisata Alam | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata Alam | BLK | | | | | | |
| | ▪ Informasi, Promosi dan Pemasaran | BLK | | | | | | |
| | ▪ Operasional Pengelolaan Obyek Wisata Alam | BLK | | | | | | |
| 18. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara | | | | | | | |
| | ▪ Analisis Kebutuhan Pengembangan Pariwisata Alam | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata Alam | BLK | | | | | | |
| | ▪ Informasi, Promosi dan Pemasaran | BLK | | | | | | |
| | ▪ Operasional Pengelolaan Obyek Wisata Alam | BLK | | | | | | |
| 19. | Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Desain Tapak | BLK | | | | | | |
| | ▪ Informasi, Promosi dan Pemasaran Potensi Obyek Wisata Alam | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi | BLK | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | Lokasi |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | |
| | IUPSWA dan IUPJWA | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi IUPSWA dan IUPJWA | BLK | | | | | |
| | ▪ Fasilitasi Forum Wisata Alam | BLK | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | |
| 20. | Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Sumberdaya Air | BLK | | | | | |
| | ▪ Valuasi Ekonomi Sumberdaya Air | BLK | | | | | |
| | ▪ Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Air | BLK | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IPA dan IUPA | BLK | | | | | |
| | ▪ Evaluasi IPA dan IUPA | BLK | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi IPA dan IUPA | BLK | | | | | |
| 21. | Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Sumberdaya Air | BLK | | | | | |
| | ▪ Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Energi Air | BLK | | | | | |
| | ▪ Demplot <i>Micro Hydro Electrical Power Plant</i> | BLK | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IPEA dan IUPEA | BLK | | | | | |
| | ▪ Evaluasi IPEA dan IUPEA | BLK | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi IPEA dan IUPEA | BLK | | | | | |
| 22. | Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Panas Bumi | BLK | | | | | |
| | ▪ Koordinasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi | BLK | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi | BLK | | | | | |
| | ▪ Evaluasi Pemanfaatan Potensi | BLK | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------|----------------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| 23. | Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang | | | | | | | |
| | ▪ Pembentukan Kader Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Kemah Bakti Kader Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan KK/KPA/KSM/KP | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi Aktivitas KK/KPA/KSM/KP | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penilaian KK/KPA/KSM/KP dalam rangka Wana Lestari | BLK | | | | | | |
| 24. | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Program dan Anggaran | BLK | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi dan Pelaporan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Data dan Informasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Kerjasama dan Kemitraan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Administrasi Kepegawaian | BLK | | | | | | |
| | ▪ Administrasi Keuangan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Ketatausahaan dan Umum | BLK | | | | | | |
| | ▪ Administrasi Perlengkapan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Peningkatan Kapasitas SDM | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana | BLK | | | | | | |
| | Jumlah | | 726.448 | 0 | 97.671 | 0 | 824.119 | |

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

| No | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Sumber/Loan | Pinjaman/Hibah Luar Negri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri (PDN) (juta) | | | | | | | Kebutuhan Dana Pendamping |
|----|--------------------------------------|-------------|---|-------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|-------|---------------------------|
| | | | Jenis PHLN (P/H/KE) | Pagu (Sesuai MoA) | Penyerapan | Tanggal Mulai | Tanggal Tutup | Rencana Penarikan | | |
| | | | | | | | | PLN/PDN | HIBAH | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | | | | | | | | - | |

Lampiran 3.H:

Formulir 3

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA –K/L)
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Kementerian/Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Program : Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
3. Sasaran Program :
 1. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati;
 2. Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati;
4. Kegiatan : Pengelolaan Taman Nasional
5. Unit Organisasi : Balai Besar/Balai Taman Nasional
6. Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaannya

| No. | Sasaran Kegiatan (Output) | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2016 | Alokasi 2016 (juta) | Dimensi | Bidang | Nawacita | Dukungan PPP/ARG/KSST/ MPI/PPBAN |
|-----|--|---|---------------|---------------------|---------|--------|----------|----------------------------------|
| 01 | Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional | Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi | 10 Dokumen | 847.994 | 02 | 12 | 07 | ---- |
| | | Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia | 10 unit | | | | | |
| | | Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan <i>reliable</i> pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia | 50 Paket Data | | | | | |
| | | Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS | 20 PKS | | | | | |
| | | Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia | 10 Unit | | | | | |

| No. | Sasaran Kegiatan (Output) | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2016 | Alokasi 2016 (juta) | Dimensi | Bidang | Nawacita | Dukungan PPP/ARG/KSST/ MPI/PPBAN |
|-----|---------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|--------|----------|----------------------------------|
| | | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan | 10 Dokumen | | | | | |
| | | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha | 30.000 Ha | | | | | |
| | | Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun | 50 Desa | | | | | |
| | | Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha | 40.000 Ha | | | | | |
| | | Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | |
| | | Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 | 2% | | | | | |
| | | Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi | 7 Paket Data | | | | | |
| | | Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit. | 10 Unit | | | | | |
| | | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara | 250.000 Orang | | | | | |
| | | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara | 4.000.000 Orang | | | | | |
| | | Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 | 20 Unit | | | | | |
| | | Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit | 5 Unit | | | | | |
| | | Jumlah pemanfaatan energi air dari | 10 Unit | | | | | |

| No. | Sasaran Kegiatan (Output) | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2016 | Alokasi 2016 (juta) | Dimensi | Bidang | Nawacita | Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN |
|---------------|---------------------------|---|-------------|---------------------|---------|--------|----------|---------------------------------|
| | | kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit | | | | | | |
| | | Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit | 1 Unit | | | | | |
| | | Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+</i> pada 2 Unit KK | - | | | | | |
| | | Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang | 1.200 Orang | | | | | |
| | | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 | 77,25 Poin | | | | | |
| Jumlah | | | | 847.994 | | | | |

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-----------------------|----------------|------|------|-----------------------|---------|-----------|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi | 10 | | 847.994 | 10 | 10 | 10 | 898.873 | 952.805 | 1.009.974 |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan | | | | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Rancangan Zonasi | | | | | | | | | |
| | ▪ Konsultasi Publik Rancangan Zonasi | | | | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi Penilaian dan Pengesahan Rancangan Zonasi | | | | | | | | | |
| | ▪ Penataan Batas Zonasi | | | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-----------------------|----------------|------|------|-----------------------|------|------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | |
| 2. | Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia | 10 | | | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | ▪ Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | |
| 3. | Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan <i>reliable</i> pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia | 50 | | | 50 | 50 | 50 | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan | | | | | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kawasan | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Database Spatial dan Non Spatial | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengelolaan Data dan Informasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Desiminasi Data dan Informasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | |
| 4. | Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS | 20 | | | 20 | 20 | 20 | | | | |
| | ▪ Pengembangan Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Kerjasama Pembangunan Strategis | | | | | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi Perjanjian Kerjasama | | | | | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | |
| 5. | Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia | 10 | | | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | ▪ <i>Self Assesment</i> METT | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pemeliharaan Batas Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-----------------------|----------------|--------|--------|-----------------------|------|------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi Kebutuhan Penelitian pada Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Program Pendidikan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberdayaan Masyarakat Tradisional | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | |
| 6. | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan | 10 | | | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kawasan | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | |
| 7. | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha | 30.000 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisa Spasial Tutupan Vegetasi Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kajian Pemulihan Ekosistem | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan Rehabilitasi Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rehabilitasi Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Restorasi Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Suksesi Alami | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kajian Tipologi Permasalahan Kawasan Konservasi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelesaian Konflik Kawasan Konservasi (Non Litigasi) | | | | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-----------------------|----------------|--------|--------|-----------------------|------|------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Non Prosedural (Non Litigasi) | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 8. | Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun | 50 | | | 50 | 50 | 50 | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prakondisi Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan dan Pembinaan Kelembagaan | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Kapasitas Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Kemitraan/Kolaborasi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan Daerah Penyangga | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 9. | Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha | 40.000 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prakondisi Zona Tradisional | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi Pengembangan Pemanfaatan Zona Tradisional | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Kemitraan/Kolaborasi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Kapasitas Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring dan Evaluasi | | | | | | | | | | |
| 10. | Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi | 34 | | | 34 | 34 | 34 | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Patroli Pengamanan Hutan | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi Pengamanan Hutan | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deteksi dan Peringatan Dini kebakaran hutan | | | | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-----------------------|----------------|------|------|-----------------------|------|------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | |
| 11. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran Tumbuhan Alam dan Satwa Liar | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring Populasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan Habitat Satwa Liar | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan Populasi Satwa Liar | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanganan Konflik Satwa Liar dan Manusia | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evakuasi Satwa Liar | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operasional dan Pemeliharaan Satwa Liar | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operasional Pusat Latihan Gajah (PLG) | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operasional <i>Conservation Response Unit</i> (CRU) | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kampanye Pelestarian Satwa Liar dan Tumbuhan Alam | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | |
| 12. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi | 7 | | | 7 | 7 | 7 | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran Tumbuhan Alam dan Satwa Liar | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring Populasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Photo Hunting Satwa Liar dan Tumbuhan Alam | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Database Spesies | | | | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|--|------------|--------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | ▪ Desiminasi Data dan Informasi | | | | | | | | | | |
| 13. | Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit. | 10 | | | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | ▪ Operasional dan Pemeliharaan Satwa Liar | | | | | | | | | | |
| | ▪ Evakuasi Satwa Liar | | | | | | | | | | |
| | ▪ Operasional Pusat Pengembangbiakan dan Suaka Satwa Liar | | | | | | | | | | |
| | ▪ Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pusat Pengembangbiakan dan Suaka Satwa Liar | | | | | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | | | | | | | | | | |
| 14. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara | 250.000 | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | | | |
| | ▪ Analisis Kebutuhan Pengembangan Pariwisata Alam | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata Alam | | | | | | | | | | |
| | ▪ Informasi dan Promosi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Operasional Pengelolaan Obyek Wisata Alam | | | | | | | | | | |
| 15. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara | 4.000.000 | | | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | | | | |
| | ▪ Analisis Kebutuhan Pengembangan Pariwisata Alam | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata Alam | | | | | | | | | | |
| | ▪ Informasi dan Promosi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Operasional Pengelolaan OWA | | | | | | | | | | |
| 16. | Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 | 20 | | | 20 | 20 | 20 | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|--|------------|--------------|-----------------------|----------------|------|------|-----------------------|------|------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | ▪ Penyusunan Desain Tapak | | | | | | | | | | |
| | ▪ Informasi dan Promosi Potensi Obyek Wisata Alam | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IUPSWA dan IUPJWA | | | | | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi IUPSWA dan IUPJWA | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | | | | | | | | | | |
| 17. | Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi SD Air | | | | | | | | | | |
| | ▪ Valuasi Ekonomi Sumberdaya Air | | | | | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi Pemanfaatan SD Air | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IPA dan IUPA | | | | | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi IPA dan IUPA | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi IPA dan IUPA | | | | | | | | | | |
| 18. | Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit | 10 | | | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Sumberdaya Air | | | | | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Energi Air | | | | | | | | | | |
| | ▪ Demplot <i>Micro Hydro Electrical Power Plant</i> | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IPEA dan IUPEA | | | | | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi IPEA dan IUPEA | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi IPEA dan IUPEA | | | | | | | | | | |
| 19. | Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Panas Bumi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi Pemanfaatan Potensi | | | | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-----------------------|------|------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Panas Bumi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi | | | | | | | | | | |
| 20. | Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard</i> (VCS) atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance</i> (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK | - | | | 1 | 1 | - | | | | |
| | ▪ Valuasi Ekonomi SDA Karbon | | | | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Dokumen Prasyarat registrasi atau sertifikasi VCS atau CCBA REDD+ | | | | | | | | | | |
| 21. | Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang | 1.200 | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | | | |
| | ▪ Pembentukan Kader Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Kemah Bakti Kader Konservasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan KK/KPA/KSM/KP | | | | | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi Aktivitas KK/KPA/KSM/KP | | | | | | | | | | |
| | ▪ Penilaian KK/KPA/KSM/KP dalam rangka Wana Lestari | | | | | | | | | | |
| 22. | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 | 77,25 Poin | | | 77,50 | 77,75 | 78,00 | | | | |
| | ▪ Penyusunan Program dan Anggaran | | | | | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi dan Pelaporan | | | | | | | | | | |
| | ▪ Data dan Informasi | | | | | | | | | | |
| | ▪ Kerjasama dan Kemitraan | | | | | | | | | | |
| | ▪ Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | |
| | ▪ Administrasi Keuangan | | | | | | | | | | |
| | ▪ Ketatausahaan dan Umum | | | | | | | | | | |
| | ▪ Administrasi Perlengkapan | | | | | | | | | | |
| | ▪ Peningkatan Kapasitas SDM | | | | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Tahun 2016 | | | Prakiraan Maju | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|------------|--------------|-----------------------|----------------|------|------|-----------------------|----------------|------------------|--|
| | | volume | Satuan Biaya | Jumlah Alokasi (juta) | Volume | | | Jumlah Alokasi (juta) | | | |
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana | | | | | | | | | | |
| | Jumlah | | | 847.994 | | | | 898.873 | 952.805 | 1.009.974 | |

B. Sumber Pendanaan

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|---------|-------------------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| 1. | Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi | | 726.042 | 0 | 121.952 | 0 | 847.994 | Seluruh Indonesia |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Rancangan Zonasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Konsultasi Publik Rancangan Zonasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi Penilaian dan Pengesahan Rancangan Zonasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penataan Batas Zonasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| 2. | Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia | | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| 3. | Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan <i>reliable</i> pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia | | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kawasan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Database Spatial dan Non Spatial | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengelolaan Data dan Informasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Desiminasi Data dan Informasi | BLK | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| 4. | Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS | | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Kerjasama Pembangunan Strategis | BLK | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi Perjanjian Kerjasama | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| 5. | Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia | | | | | | | |
| | ▪ <i>Self Assesment</i> METT | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pemeliharaan Batas Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Identifikasi Kebutuhan Penelitian pada Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Program Pendidikan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pemberdayaan Masyarakat Tradisional | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| 6. | Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan | | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kawasan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan | BLK | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| 7. | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha | | | | | | | |
| | ▪ Analisa Spasial Tutupan Vegetasi Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Kajian Pemulihan Ekosistem | BLK | | | | | | |
| | ▪ Perencanaan Rehabilitasi Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Rehabilitasi Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Restorasi Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Suksesi Alami | BLK | | | | | | |
| | ▪ Kajian Tipologi Permasalahan Kawasan Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penyelesaian Konflik Kawasan Konservasi (Non Litigasi) | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Non Prosedural (Non Litigasi) | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 8. | Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun | | | | | | | |
| | ▪ Prakondisi Pemberdayaan Masyarakat | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembentukan dan Pembinaan Kelembagaan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif | BLK | | | | | | |
| | ▪ Peningkatan Kapasitas Masyarakat | BLK | | | | | | |
| | ▪ Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Kemitraan/Kolaborasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penetapan Daerah Penyangga | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 9. | Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha | | | | | | | |
| | ▪ Prakondisi Zona Tradisional | BLK | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| | ▪ Sosialisasi Pengembangan Pemanfaatan Zona Tradisional | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Kemitraan/Kolaborasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Peningkatan Kapasitas Masyarakat | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring dan Evaluasi | BLK | | | | | | |
| 10. | Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi | | | | | | | |
| | ▪ Patroli Pengamanan Hutan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi Pengamanan Hutan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Deteksi dan Peringatan Dini kebakaran hutan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| 11. | Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 | | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran Tumbuhan Alam dan Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring Populasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan Habitat Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan Populasi Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penanganan Konflik Satwa Liar dan Manusia | BLK | | | | | | |
| | ▪ Evakuasi Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Operasional dan Pemeliharaan Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa | BLK | | | | | | |
| | ▪ Operasional Pusat Latihan Gajah (PLG) | BLK | | | | | | |
| | ▪ Operasional <i>Conservation Response Unit (CRU)</i> | BLK | | | | | | |
| | ▪ Kampanye Pelestarian Satwa Liar dan Tumbuhan Alam | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| 12. | Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| | genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi | | | | | | | |
| | ▪ Identifikasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran Tumbuhan Alam dan Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Monitoring Populasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Photo Hunting Satwa Liar dan Tumbuhan Alam | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Database Spesies | BLK | | | | | | |
| | ▪ Desiminasi Data dan Informasi | BLK | | | | | | |
| 13. | Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (<i>sanctuary</i>) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit. | | | | | | | |
| | ▪ Operasional dan Pemeliharaan Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Evakuasi Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Operasional Pusat Pengembangbiakan dan Suaka Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pusat Pengembangbiakan dan Suaka Satwa Liar | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi dan Konsultasi | BLK | | | | | | |
| 14. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara | | | | | | | |
| | ▪ Analisis Kebutuhan Pengembangan Pariwisata Alam | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata Alam | BLK | | | | | | |
| | ▪ Informasi dan Promosi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Operasional Pengelolaan Obyek Wisata Alam | BLK | | | | | | |
| 15. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara | | | | | | | |
| | ▪ Analisis Kebutuhan Pengembangan Pariwisata Alam | BLK | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata Alam | BLK | | | | | | |
| | ▪ Informasi dan Promosi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Operasional Pengelolaan OWA | BLK | | | | | | |
| 16. | Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Desain Tapak | BLK | | | | | | |
| | ▪ Informasi dan Promosi Potensi Obyek Wisata Alam | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IUPSWA dan IUPJWA | BLK | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi IUPSWA dan IUPJWA | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi | BLK | | | | | | |
| 17. | Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit | | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi SD Air | BLK | | | | | | |
| | ▪ Valuasi Ekonomi Sumberdaya Air | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi Pemanfaatan SD Air | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IPA dan IUPA | BLK | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi IPA dan IUPA | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi IPA dan IUPA | BLK | | | | | | |
| 18. | Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit | | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Sumberdaya Air | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Energi Air | BLK | | | | | | |
| | ▪ Demplot <i>Micro Hydro Electrical Power Plant</i> | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IPEA dan IUPEA | BLK | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi IPEA dan IUPEA | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi IPEA dan IUPEA | BLK | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| 19. | Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit | | | | | | | |
| | ▪ Inventarisasi Potensi Panas Bumi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Koordinasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi | BLK | | | | | | |
| 20. | Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+</i> pada 2 Unit KK | | | | | | | |
| | ▪ Valuasi Ekonomi SDA Karbon | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Dokumen Prasyarat registrasi atau sertifikasi VCS atau CCBA REDD+ | BLK | | | | | | |
| 21. | Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang | | | | | | | |
| | ▪ Pembentukan Kader Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Kemah Bakti Kader Konservasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan KK/KPA/KSM/KP | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pembinaan dan Koordinasi Aktivitas KK/KPA/KSM/KP | BLK | | | | | | |
| | ▪ Penilaian KK/KPA/KSM/KP dalam rangka Wana Lestari | BLK | | | | | | |
| 22. | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 | | | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Program dan Anggaran | BLK | | | | | | |
| | ▪ Evaluasi dan Pelaporan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Data dan Informasi | BLK | | | | | | |
| | ▪ Kerjasama dan Kemitraan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Administrasi Kepegawaian | BLK | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Jenis Komponen (BAK/BLK) | Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (juta) | | | | | Lokasi |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------|----------------|--------|
| | | | Rupiah | PHLN + PDN | PNBP + BLU | SBSN | Jumlah | |
| | ▪ Administrasi Keuangan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Ketatausahaan dan Umum | BLK | | | | | | |
| | ▪ Administrasi Perlengkapan | BLK | | | | | | |
| | ▪ Peningkatan Kapasitas SDM | BLK | | | | | | |
| | ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana | BLK | | | | | | |
| | Jumlah | | 726.448 | 0 | 97.671 | 0 | 824.119 | |

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

| No | Indikator Kinerja Kegiatan/ Komponen | Sumber/Loan | Pinjaman/Hibah Luar Negri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri (PDN) (juta) | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-------------|---|-------------------|------------|---------------|---------------|-------------------|-------|---------------------------|
| | | | Jenis PHLN (P/H/KE) | Pagu (Sesuai MoA) | Penyerapan | Tanggal Mulai | Tanggal Tutup | Rencana Penarikan | | Kebutuhan Dana Pendamping |
| | | | | | | | | PLN/PDN | HIBAH | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | | | | | | | | | |

Lampiran 4:

DAFTAR PAGU ANGGARAN PER SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

| No. | SATUAN KERJA | LAYANAN PERKANTORAN (RM) | | | NON OPERASIONAL | | | | TOTAL |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | BELANJA PEGAWAI | OPERASIONAL | JUMLAH | RM | PNBP | HLN | JUMLAH | |
| A. SATKER PUSAT | | | | | | | | | |
| 1. | Direktorat PIKA | - | 1.250.000 | 1.250.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | - | 10.000.000 | 11.250.000 |
| 2. | Direktorat Kawasan Konservasi | - | 1.500.000 | 1.500.000 | 7.200.000 | 1.800.000 | 19.200.000 | 28.200.000 | 29.700.000 |
| 3. | Direktorat KKH | - | 1.500.000 | 1.500.000 | 8.800.000 | 2.200.000 | - | 11.000.000 | 12.500.000 |
| 4. | Direktorat PJLHK | - | 1.600.000 | 1.600.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | - | 10.000.000 | 11.600.000 |
| 5. | Direktorat BPPE | - | 750.000 | 750.000 | 5.200.000 | 1.300.000 | 2.510.000 | 9.010.000 | 9.760.000 |
| 6. | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KSDAE | 40.042.496 | 4.250.000 | 44.292.496 | 14.800.000 | 3.700.000 | - | 18.500.000 | 62.792.496 |
| B. SATKER KSDA | | | | | | | | | |
| 1. | BKSDA NAD | 9.992.533 | 1.650.000 | 11.642.533 | 3.261.000 | 2.174.000 | - | 5.435.000 | 17.077.533 |
| 2. | BBKSDA SUMATERA UTARA | 20.895.975 | 3.215.000 | 24.110.975 | 6.221.000 | 4.148.000 | - | 10.369.000 | 34.479.975 |
| 3. | BKSDA SUMATERA BARAT | 10.353.137 | 1.600.000 | 11.953.137 | 2.611.000 | 1.740.000 | - | 4.351.000 | 16.304.137 |
| 4. | BBKSDA RIAU | 14.139.169 | 3.200.000 | 17.339.169 | 4.815.000 | 3.210.000 | - | 8.025.000 | 25.364.169 |
| 5. | BKSDA JAMBI | 8.147.693 | 2.710.000 | 10.857.693 | 2.535.000 | 1.690.000 | - | 4.225.000 | 15.082.693 |
| 6. | BKSDA SUMATERA SELATAN | 19.136.063 | 2.700.000 | 21.836.063 | 5.962.000 | 3.975.000 | - | 9.937.000 | 31.773.063 |
| 7. | BKSDA BENGKULU | 12.125.513 | 1.600.000 | 13.725.513 | 3.195.000 | 2.130.000 | - | 5.325.000 | 19.050.513 |
| 8. | BKSDA LAMPUNG | 8.977.670 | 1.700.000 | 10.677.670 | 2.936.000 | 1.958.000 | - | 4.894.000 | 15.571.670 |
| 9. | BKSDA DKI JAKARTA | 10.679.423 | 1.700.000 | 12.379.423 | 3.440.000 | 2.294.000 | - | 5.734.000 | 18.113.423 |
| 10. | BBKSDA JAWA BARAT | 25.260.280 | 2.800.000 | 28.060.280 | 6.982.000 | 4.488.000 | 1.500.000 | 12.970.000 | 41.030.280 |
| 11. | BKSDA JAWA TENGAH | 10.349.541 | 2.100.000 | 12.449.541 | 3.300.000 | 2.200.000 | - | 5.500.000 | 17.949.541 |
| 12. | BKSDA D.I. YOGYAKARTA | 6.892.355 | 1.550.000 | 8.442.355 | 2.703.000 | 1.802.000 | - | 4.505.000 | 12.947.355 |
| 13. | BBKSDA JAWA TIMUR | 20.008.796 | 2.601.800 | 22.610.596 | 4.886.000 | 3.258.000 | - | 8.144.000 | 30.754.596 |
| 14. | BKSDA BALI | 9.965.479 | 1.500.000 | 11.465.479 | 3.030.000 | 2.020.000 | - | 5.050.000 | 16.515.479 |
| 15. | BKSDA NUSA TENGGARA BARAT | 9.568.623 | 1.800.000 | 11.368.623 | 4.398.000 | 2.932.000 | - | 7.330.000 | 18.698.623 |
| 16. | BBKSDA NUSA TENGGARA TIMUR | 17.522.483 | 2.550.000 | 20.072.483 | 4.257.000 | 2.838.000 | - | 7.095.000 | 27.167.483 |
| 17. | BKSDA KALIMANTAN BARAT | 10.579.863 | 2.150.000 | 12.729.863 | 3.495.000 | 2.330.000 | - | 5.825.000 | 18.554.863 |
| 18. | BKSDA KALIMANTAN SELATAN | 8.707.840 | 2.200.000 | 10.907.840 | 2.888.000 | 1.925.000 | - | 4.813.000 | 15.720.840 |
| 19. | BKSDA KALIMANTAN TIMUR | 10.581.863 | 2.505.200 | 13.087.063 | 3.197.000 | 2.132.000 | - | 5.329.000 | 18.416.063 |
| 20. | BKSDA KALIMANTAN TENGAH | 9.174.202 | 2.300.000 | 11.474.202 | 3.034.000 | 2.023.000 | - | 5.057.000 | 16.531.202 |
| 21. | BKSDA SULAWESI UTARA | 6.523.867 | 1.850.000 | 8.373.867 | 2.743.000 | 1.829.000 | - | 4.572.000 | 12.945.867 |
| 22. | BKSDA SULAWESI TENGAH | 8.922.015 | 1.400.000 | 10.322.015 | 2.671.000 | 1.781.000 | - | 4.452.000 | 14.774.015 |
| 23. | BKSDA SULAWESI TENGGARA | 10.373.196 | 1.600.000 | 11.973.196 | 3.411.000 | 2.274.000 | - | 5.685.000 | 17.658.196 |

| No. | SATUAN KERJA | LAYANAN PERKANTORAN (RM) | | | NON OPERASIONAL | | | | TOTAL |
|-----------|------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|---------|------------|------------|
| | | BELANJA PEGAWAI | OPERASIONAL | JUMLAH | RM | PNBP | HLN | JUMLAH | |
| 24. | BBKSDA SULAWESI SELATAN | 19.840.345 | 2.860.000 | 22.700.345 | 6.827.000 | 4.551.000 | - | 11.378.000 | 34.078.345 |
| 25. | BKSDA MALUKU | 9.091.172 | 1.300.000 | 10.391.172 | 3.370.000 | 2.247.000 | - | 5.617.000 | 16.008.172 |
| 26. | BBKSDA PAPUA | 13.188.785 | 3.900.000 | 17.088.785 | 4.424.000 | 2.950.000 | - | 7.374.000 | 24.462.785 |
| 27. | BBKSDA PAPUA BARAT | 12.619.468 | 2.050.000 | 14.669.468 | 4.235.000 | 2.823.000 | - | 7.058.000 | 21.727.468 |
| | | | | | | | | - | |
| C. | SATKER TAMAN NASIONAL | | | | | | | - | |
| 1. | BBTN GUNUNG LEUSER | 17.713.758 | 2.750.000 | 20.463.758 | 5.872.000 | 3.915.000 | - | 9.787.000 | 30.250.758 |
| 2. | BTN BATANG GADIS | 4.332.423 | 1.500.000 | 5.832.423 | 2.188.000 | 1.459.000 | - | 3.647.000 | 9.479.423 |
| 3. | BTN SIBERUT | 6.736.917 | 1.500.000 | 8.236.917 | 2.444.000 | 1.630.000 | - | 4.074.000 | 12.310.917 |
| 4. | BTN BUKIT TIGA PULUH | 7.344.557 | 1.400.000 | 8.744.557 | 2.176.000 | 1.451.000 | - | 3.627.000 | 12.371.557 |
| 5. | BTN TESSO NILO | 3.973.140 | 1.500.000 | 5.473.140 | 2.379.000 | 1.586.000 | - | 3.965.000 | 9.438.140 |
| 6. | BBTN KERINCI SEBLAT | 17.602.397 | 2.300.000 | 19.902.397 | 4.962.000 | 3.308.000 | - | 8.270.000 | 28.172.397 |
| 7. | BTN BERBAK | 7.728.110 | 1.700.000 | 9.428.110 | 2.295.000 | 1.530.000 | - | 3.825.000 | 13.253.110 |
| 8. | BTN BUKIT 12 | 3.510.146 | 1.250.000 | 4.760.146 | 2.233.000 | 1.489.000 | - | 3.722.000 | 8.482.146 |
| 9. | BTN SEMBILANG | 5.005.787 | 1.130.000 | 6.135.787 | 2.282.000 | 1.521.000 | - | 3.803.000 | 9.938.787 |
| 10. | BBTN BUKIT BARISAN SELATAN | 11.306.076 | 2.000.000 | 13.306.076 | 3.687.000 | 2.458.000 | - | 6.145.000 | 19.451.076 |
| 11. | BTN WAY KAMBAS | 20.677.263 | 1.800.000 | 22.477.263 | 3.724.000 | 2.482.000 | - | 6.206.000 | 28.683.263 |
| 12. | BTN KEPULAUAN SERIBU | 9.616.139 | 1.700.000 | 11.316.139 | 2.494.000 | 1.663.000 | - | 4.157.000 | 15.473.139 |
| 13. | BTN UJUNG KULON | 10.256.432 | 1.700.000 | 11.956.432 | 3.460.000 | 2.307.000 | - | 5.767.000 | 17.723.432 |
| 14. | BBTN GUNUNG GEDE PANGRANGO | 13.185.048 | 2.300.000 | 15.485.048 | 5.595.000 | 3.730.000 | 500.000 | 9.825.000 | 25.310.048 |
| 15. | BTN GUNUNG HALIMUN SALAK | 9.350.272 | 2.200.000 | 11.550.272 | 3.343.000 | 2.229.000 | - | 5.572.000 | 17.122.272 |
| 16. | BTN GUNUNG CEREMAI | 6.567.004 | 1.120.000 | 7.687.004 | 2.220.000 | 1.480.000 | - | 3.700.000 | 11.387.004 |
| 17. | BTN GUNUNG MERBABU | 4.400.509 | 1.200.000 | 5.600.509 | 2.181.000 | 1.454.000 | - | 3.635.000 | 9.235.509 |
| 18. | BTN. GUNUNG MERAPI | 6.809.541 | 1.300.000 | 8.109.541 | 1.980.000 | 1.320.000 | - | 3.300.000 | 11.409.541 |
| 19. | BTN BALURAN | 7.478.350 | 1.550.000 | 9.028.350 | 2.173.000 | 1.449.000 | - | 3.622.000 | 12.650.350 |
| 20. | BBTN BROMO TENGGER SEMERU | 10.797.038 | 2.250.000 | 13.047.038 | 3.600.000 | 2.400.000 | - | 6.000.000 | 19.047.038 |
| 21. | BTN MERU BETIRI | 8.541.291 | 1.400.000 | 9.941.291 | 2.482.000 | 1.655.000 | - | 4.137.000 | 14.078.291 |
| 22. | BTN ALAS PURWO | 8.443.500 | 1.500.000 | 9.943.500 | 3.033.000 | 2.022.000 | - | 5.055.000 | 14.998.500 |
| 23. | BTN BALI BARAT | 10.771.882 | 2.000.000 | 12.771.882 | 3.273.000 | 2.182.000 | - | 5.455.000 | 18.226.882 |
| 24. | BTN GUNUNG RINJANI | 8.613.144 | 1.700.000 | 10.313.144 | 3.194.000 | 2.129.000 | - | 5.323.000 | 15.636.144 |
| 25. | BTN KOMODO | 8.159.557 | 1.500.000 | 9.659.557 | 2.680.000 | 1.787.000 | - | 4.467.000 | 14.126.557 |
| 26. | BTN KARIMUN JAWA | 7.860.181 | 1.431.200 | 9.291.381 | 2.512.000 | 1.675.000 | - | 4.187.000 | 13.478.381 |
| 27. | BTN KELIMUTU | 4.853.943 | 1.500.000 | 6.353.943 | 2.365.000 | 1.577.000 | - | 3.942.000 | 10.295.943 |
| 28. | BTN MANUPEU TANADARU | 3.464.823 | 1.500.000 | 4.964.823 | 2.243.000 | 1.495.000 | - | 3.738.000 | 8.702.823 |
| 29. | BTN LAIWANGI WANGGAMETTI | 3.834.805 | 1.250.000 | 5.084.805 | 2.246.000 | 1.497.000 | - | 3.743.000 | 8.827.805 |
| 30. | BBTN BETUNG KERIHUN | 7.420.701 | 2.000.000 | 9.420.701 | 3.392.000 | 2.261.000 | - | 5.653.000 | 15.073.701 |

| No. | SATUAN KERJA | LAYANAN PERKANTORAN (RM) | | | NON OPERASIONAL | | | | TOTAL |
|-----|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | BELANJA PEGAWAI | OPERASIONAL | JUMLAH | RM | PNBP | HLN | JUMLAH | |
| 31. | BTN BUKIT BAKA BUKIT RAYA | 5.844.151 | 1.500.000 | 7.344.151 | 2.461.000 | 1.641.000 | - | 4.102.000 | 11.446.151 |
| 32. | BTN GUNUNG PALUNG | 6.644.473 | 1.250.000 | 7.894.473 | 2.105.000 | 1.403.000 | - | 3.508.000 | 11.402.473 |
| 33. | BTN DANAU SENTARUM | 3.285.570 | 1.500.000 | 4.785.570 | 2.290.000 | 1.526.000 | - | 3.816.000 | 8.601.570 |
| 34. | BTN TANJUNG PUTING | 7.674.665 | 1.500.000 | 9.174.665 | 2.552.000 | 1.701.000 | - | 4.253.000 | 13.427.665 |
| 35. | BTN KUTAI | 9.173.788 | 2.350.000 | 11.523.788 | 2.773.000 | 1.848.000 | - | 4.621.000 | 16.144.788 |
| 36. | BTN SEBANGAU | 4.676.096 | 1.500.000 | 6.176.096 | 2.063.000 | 1.375.000 | - | 3.438.000 | 9.614.096 |
| 37. | BTN KAYAN MENTARANG | 4.145.649 | 1.700.000 | 5.845.649 | 2.639.000 | 1.760.000 | - | 4.399.000 | 10.244.649 |
| 38. | BTN BOGANI NANI WARTABONE | 11.382.009 | 1.750.000 | 13.132.009 | 3.435.000 | 2.290.000 | - | 5.725.000 | 18.857.009 |
| 39. | BTN BUNAKEN | 5.454.234 | 1.250.000 | 6.704.234 | 2.102.000 | 1.401.000 | - | 3.503.000 | 10.207.234 |
| 40. | BBTN LORE LINDU | 9.217.140 | 2.450.000 | 11.667.140 | 3.765.000 | 2.510.000 | - | 6.275.000 | 17.942.140 |
| 41. | BTN KEPULAUAN TOGEAN | 3.841.885 | 1.100.000 | 4.941.885 | 1.861.000 | 1.240.000 | - | 3.101.000 | 8.042.885 |
| 42. | BTN TAKA BONERATE | 5.997.232 | 1.050.000 | 7.047.232 | 2.049.000 | 1.366.000 | - | 3.415.000 | 10.462.232 |
| 43. | BTN BANTIMURUNG BULUSARAUNG | 6.050.661 | 2.150.000 | 8.200.661 | 2.413.000 | 1.608.000 | - | 4.021.000 | 12.221.661 |
| 44. | BTN RAWA AOPA WATUMOHAI | 6.897.312 | 1.500.000 | 8.397.312 | 2.867.000 | 1.911.000 | - | 4.778.000 | 13.175.312 |
| 45. | BTN WAKATOBI | 6.469.920 | 1.650.000 | 8.119.920 | 2.923.000 | 1.948.000 | - | 4.871.000 | 12.990.920 |
| 46. | BTN MANUSELA | 6.078.005 | 1.250.000 | 7.328.005 | 2.039.000 | 1.359.000 | - | 3.398.000 | 10.726.005 |
| 47. | BTN AKETAJAWE LOLOBATA | 3.376.665 | 1.200.000 | 4.576.665 | 1.977.000 | 1.318.000 | - | 3.295.000 | 7.871.665 |
| 48. | BTN WASUR | 7.555.630 | 1.700.000 | 9.255.630 | 2.906.000 | 1.938.000 | - | 4.844.000 | 14.099.630 |
| 49. | BTN LORENTZ | 6.697.396 | 1.800.000 | 8.497.396 | 3.947.000 | 2.631.000 | - | 6.578.000 | 15.075.396 |
| 50. | BBTN TELUK CENDERAWASIH | 12.931.411 | 2.500.000 | 15.431.411 | 4.326.000 | 2.884.000 | - | 7.210.000 | 22.641.411 |
| | TOTAL | 770.408.471 | 152.591.529 | 923.000.000 | 375.000.000 | 200.000.000 | 23.710.000 | 598.710.000 | 1.521.710.000 |

Conservation Planner



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8, Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : (021) 5730301 – 5730316 Faximile : (021) 5733437
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15 Bogor, Telepon : (0251) 8324014, 8311118